



Buletin Ketenagalistrikan

Edisi 38 Volume 10, Juni 2014

Pembangunan PLTP Ditargetkan 570 MW Pertahun



Menteri ESDM Tonton Film Bersama Para Pelajar

Pemerintah Siapkan Regulasi Power Wheeling



Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan Energi



Kementerian KUKM Dukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan



Dari Redaksi

Kamis (17/4) lalu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar Coffee morning tentang Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2014 ini keluar sesuai dengan hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 21 Januari 2014. Dalam Raker tersebut Komisi VII DPR RI menerima dan menyetujui usulan Pemerintah untuk melakukan penghapusan subsidi listrik secara bertahap bagi pelanggan industri menengah (I-3) yang go public dan Industri besar (I-4) serta penerapan tariff adjustment terhadap pelanggan listrik non subsidi rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3) dan kantor pemerintah sedang (P-1) terhitung tanggal 1 Mei 2014 setiap 2 (dua) bulan sampai dengan Desember 2014.

Penyesuaian tarif listrik ini tentu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat. Beberapa hal yang harus diketahui antara lain bahwa selama ini masyarakat pelanggan listrik dimanjakan dengan tarif listrik yang disubsidi. Hal ini mengakibatkan penggunaan listrik yang cenderung boros, dan sulit sekali diajak untuk hemat listrik. Dengan disesuaikannya tarif listrik pelanggan tersebut menjadi tarif listrik non subsidi, tentu akan memaksa pengguna dengan sendirinya untuk lebih berhemat menggunakan listrik, jika dia tidak mau membayar tagihan yang besar.

Selain itu dengan adanya penghematan disisi konsumen, tentu turut mengurangi tenaga listrik yang harus disediakan/dibangkitkan, terutama yang dibangkitkan dengan membakar BBM di pembangkit listrik, dan ini akan mengurangi biaya produksi listrik, dan pada akhirnya juga mengurangi subsidi listrik. Dengan adanya penghapusan subsidi listrik bagi pelanggan industri menengah I-3 daya di atas 200 kVA dan industri besar I-4 daya 30.000 kVA ke atas akan merangsang pelanggan industri tersebut untuk mengusahakan kebutuhan listriknya sendiri dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan membeli dari PLN. Subsidi listrik yang dihemat dapat dialihkan oleh Pemerintah untuk membangun infrastruktur listrik di Indonesia dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 80,51%, sehingga semakin banyak lagi daerah-daerah yang bisa menikmati listrik.

Selain artikel mengenai coffee morning mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik, Buletin Edisi 38 Volume X ini menghadirkan berbagai liputan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan seperti penandatanganan MOU Kementerian ESDM dengan Kementerian KUKM serta peluncuran gerakan hemat energi di Studio XXI Mal Epicentrum serta kegiatan menarik lainnya.

Selamat membaca.

Alamat Redaksi

Sekretariat Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-2 Kav.07-08,
Kuningan, Jakarta 12950

Telepon/Fax (021) 5225180

Email : buletin@djlpe.esdm.go.id

DAFTAR ISI**Berita**

• Integrasi Sistem Energi Terbarukan Jadi Tantangan ASEAN	4
• Dirjen Ketenagalistrikan terima 60m CPNS	6
• Kebutuhan Listrik Terus Naik, Pembangkit Listrik dari EBT Digalakkan	8
• Kementerian ESDM Unjuk Gigi di Pameran AITIS 2014.....	10
• DJK Selenggarakan Coffee Morning Penyesuaian TTL 2014.....	12
• Pembangunan PLTP Ditargetkan 570 MW Pertahun.....	14
• Peluang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan Terbuka	16
• Hindari Defisit Listrik, Pembangunan Pembangkit Harus Tepat Waktu.....	18
• NTB Kebut Pembangunan Pembangkit Listrik Non Migas	20
• Pemerintah Siapkan Regulasi Power Wheeling	22
• Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan Energi	24
• Pemerintah Terbitkan Peraturan Terbaru untuk Tambah kapasitas Listrik	26
• Menteri ESDM Tonton Film Bersama Para Pelajar.....	28
• Pemerintah Beri Prioritas Pembangkit EBT	30
• Kementerian KUKM Dukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan.....	31
• Sertifikasi Ketenagalistrikan Akan Dilakukan Secara Online	32
• Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik.	34
• Dirjen Ketenagalistrikan Lantik Pejabat Eselon III dan IV	36

ARTIKEL

• Pengurangan Subsidi Listrik Golongan Tertentu Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik..	38
• Tinjauan Listrik Perdesaan di Provinsi NTB Tahun 2013	42
• TTL, Penerapannya Bertentangkankah Dengan Prinsip Persaingan Usaha yang Sehat?	46

SUSUNAN REDAKSI**Penanggung Jawab**

Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Redaktur

Totoh Abdul Fatah, Heru Setiawan, Hinsa Silaen, Ear Marison, Hagni Surendro, Felix Rudianto, Slamet Riyadi, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Pandu Satria Jati, David F Silalahi, Ilham Budi, Elif Doka Marliska, Andi Winarno, Eri Nurcahyanto, Novan Akhiryanto, Dina Andriani

Penyunting/ Editor

Ernawati, Suwarno, Matilda Parameswari, Stefanus Wisnu W

Desain Grafis/Fotografer

Achmad Yusuf Haryono Agus Supriyadi, Ajat Munajat, Novi Pravitasari, Adar

Sekretariat

Emi Tursilah, Irman Suryana, Efrika Maritho, Rizka Octiwi, Riono Saputra

Integrasi Sistem Energi Terbarukan Jadi Tantangan ASEAN

Penulis : Ridwan Budi Santoso



Peserta Workshop and Focus Group Discussion on Integration of Variable Renewable sources Energies into Power Systems, Senin (01/04) di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

Di Indonesia, sistem energi terbarukan untuk pembangkit listrik yang beroperasi secara mandiri banyak dijumpai, namun sistem tersebut berjalan secara terpisah dari sistem utama. Integrasi sistem energi terbarukan tersebut merupakan tantangan bagi kawasan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat menyampaikan Welcome Remark pada Workshop and Focus Group Discussion on Integration of Variable Renewable sources Energies into Power Systems, Senin (01/04) di JS Luwansa Hotel, Jakarta. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dilaksanakan atas kolaborasi GIZ Jerman, ACE, HAPUA, dan Indonesia Power, dan dihadiri oleh perwakilan sejumlah negara ASEAN, dan NGO. Dalam sambutannya, Jarman menyampaikan bahwa tema workshop ini sejalan dengan

kebijakan Pemerintah Indonesia yang mendorong pengembangan energi terbarukan secara optimal dan seimbang dengan sumber energi fosil yang digunakan selama ini. Menurutnya hal ini merupakan tantangan bagi pertumbuhan kebutuhan listrik Indonesia yang mencapai 7,8% di tahun lalu, serta diproyeksikan akan terus tumbuh sekitar 8,4% pertahun di dekade mendatang.

Menurut Jarman, penerapan teknologi Smart Grid akan berdampak pada bisnis penyediaan tenaga listrik. Pada bisnis konvensional perusahaan penyedia listrik menjual listrik ke konsumen. Namun dengan teknologi Smart Grid kondisi sebaliknya memungkinkan terjadi. Di samping itu penerapan teknologi Smart Grid berkontribusi



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat menyampaikan Welcome Remark

atas pengurangan emisi karbon. Hal ini sama seperti yang disampaikan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tentang komitmen Indonesia untuk pengurangan emisi gas rumah kaca (Green House Gas) pada tahun 2020 mencapai 26% seperti kondisi normal, bahkan bisa mencapai 41% dengan dukungan internasional. "Beliau (Presiden-red) mengharapkan GIZ berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang ini," ujar Jarman.

DR. Rudolf Rausch, Program Director Renewable Energy GIZ pada sambutannya menyampaikan optimalisasi

seimbang energi terbarukan atas energi konvensional merupakan tuntutan dan tantangan terhadap pembangkitan tenaga listrik di masa mendatang bagi seluruh negara, termasuk ASEAN. Eri Prabowo, Chairman WG1 HAPUA menyampaikan bahwa kegiatan ASEAN RESP termasuk knowledge transfer dan capacity building. Smart grid technology sebagai suatu teknologi optimalisasi rekayasa sisi supply dan demand. "Kerjasama dan berbagi pengalaman merupakan jembatan untuk penerapan teknologi tersebut di ASEAN," ungkapnya.

Selanjutnya Hardiv Situmeang, direktur eksekutif ACE, menyampaikan bahwa energi terbarukan sebagai alternatif dapat memberikan keseimbangan atas pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup. Teknologi ini juga sebagai kesempatan untuk mengembangkan variabel tertentu dari energi terbarukan di ASEAN. Agenda workshop ini meliputi kajian teknis, ekonomis dan strategis vRE Grid Integration, termasuk rekomendasi untuk implementasi di ASEAN. (RBS-PSJ)

Dirjen Ketenagalistrikan Terima 60 CPNS

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen ketenagalistrikan Jarman didampingi para pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen ketenagalistrikan menerima 60 Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu (2/4).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc pada Rabu (2/4) menerima 60 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian ESDM yang ditempatkan di unit kerja Direktorat Jenderal Kenagalistrikan. Keenam puluh CPNS ini merupakan hasil seleksi dari penerimaan CPNS pada Septembe-November 2013 yang lalu. Sehari sebelumnya para CPNS yang berasal dari seluruh Indonesia ini mendapatkan pengarahan dari Kepala Biro kepegawaian KESDM. Sebelum ditempatkan di unit kerja masing-masing, para CPNS yang mendapatkan SK pada tanggal 1 April 2014 ini diberikan arahan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian DJK Asep Rachman Saepullah sebelum diterima oleh Dirjen Ketenagalistrikan Jarman.

Dalam sambutannya Dirjen berpesan agar para CPNS mampu menunjukkan prestasi dan kompetensi. “Selain kompetensi teknis, kompetensi yang harus dimiliki seorang pegawai negeri adalah memiliki integritas,

loyalitas, dan acceptibilitas,” ungkap Jarman. Menurutnya setiap Pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan instansi dan kode etik profesi, serta bertindak jujur dalam mengemban



60 CPNS yang diterima berasal dari berbagai disiplin ilmu. Sebagian besar merupakan calon inspektur ketenagalistrikan.



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan arahan kepada 60 CPNS Ditjen Ketenagalistrikan. Dirjen berpesan agar para CPNS mampu menunjukkan prestasi dan kompetensi.

tugas. PNS menurutnya harus mampu berkomitmen sesuai dengan instruksi atasan asalkan sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku. PNS juga harus mampu menyesuaikan diri serta menjaga sopan santun dan saling menghormati antar sesama karyawan.

Dalam kesempatan tersebut Jarman juga mengenalkan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Tugas dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Ketenagalistrikan. Sedangkan fungsi yang diemban DJK adalah perumusan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan, serta pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Jarman memotivasi seluruh CPNS untuk meningkatkan kemampuan diri dan profesi. Menurutnya para PNS mendapat kesempatan yang luas untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3. Menurutnya pekerjaan sebagai PNS bukan untuk mencari pendapatan besar, namun untuk tanggung jawab yang besar. "Jika anda mencari pendapatan besar di PNS, maka anda salah," ujar Dirjen. Dalam satu-dua tahun bekerja, menurutnya para pegawai di DJK sudah mendapat tanggung jawab yang besar untuk perumusan kebijakan maupun teknis yang

pengaruhnya cukup besar di masyarakat.

Selepas menyampaikan sambutan, para CPNS berkenalan satu persatu di depan Dirjen ketenagalistrikan sebelum diserahkan kepada atasan masing-masing untuk mulai bekerja. Para CPNS ini akan mendapatkan orientasi di Diklat Pra jabatan sebelum diangkat menjadi Pegawai negeri Sipil. Selamat datang dan Selamat bergabung. (PSJ)

Kebutuhan Listrik Terus Naik, Pembangkit Listrik dari EBT Digalakkan

Penulis : Pandu Satria Jati B



Menteri ESDM Jero Wacik, Senin (7/4) memukul gong tanda diresmikannya groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) Bangli serta Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dibiayai APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran (TA) 2013.

Kapasitas pembangkit listrik di Indonesia saat ini mencapai sekitar 48.000 MW. Dalam sepuluh tahun terakhir pemerintah telah membangun 25.000 MW untuk pembangkit listrik, namun kapasitas tersebut masih kurang karena masyarakat telah maju dan terus membutuhkan listrik. Untuk itu pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT) harus digalakkan di semua tempat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Senin (7/4) saat Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLT Biomassa) Bangli serta Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang dibiayai APBN Kementerian ESDM Tahun Anggaran (TA) 2013. Menurut Menteri ESDM, bertambahnya kebutuhan listrik menunjukkan produktivitas masyarakat meningkat. “Dulu di

desa-desa tidak ada listrik, namun saat ini semua minta listrik,” ujar Jero Wacik. Menurutnya membangkitkan listrik yang besar biasanya menggunakan bata bara yang berkapasitas mencapai 1.000 MW untuk satu pembangkit. “Kita harus cari cara agar memangkitkan listrik dengan batubara namun pencemarannya sedikit mungkin,” ungkapnya.

Menurut Wacik, pembangkit listrik dari energi baru terbarukan

memang berkapasitas kecil, namun sangat ramah lingkungan. Ia memberikan contoh PLTMH yang menggunakan air terjun merupakan pembangkit listrik yang sangat murah dan akan bertahan seumur hidup. Cahaya matahari yang melimpah setiap hari dapat dimanfaatkan sebagai PLTS. Selain itu, PLT Biomassa yang menggunakan bahan bakar limbah dapat dibangun di semua tempat. Wacik mencontohkan PLT Biomassa yang dibangun di Bangli adalah



Penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan Bupati Bangli tentang Pengembangan Kawasan Energi Baru Terbarukan.



Menteri ESDM Jero Wacik mengajak semua pihak untuk optimis bahwa kebutuhan listrik dari energi baru terbarukan dapat terus ditingkatkan.

PLT Biomassa yang menggunakan limbah bambu. Menurutnya bambu yang baik digunakan untuk kerajinan, sedangkan sisanya dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Wacik mengajak semua pihak untuk optimis bahwa kebutuhan listrik dari energi baru terbarukan dapat terus ditingkatkan. "Saya perintahkan Bupati dan Walikota untuk mempermudah izin pembangunan pembangkit berbahan bakar energi terbarukan. Jika perlu beri insentif," lanjut Wacik. Ia juga menargetkan di tahun 2018 Kementerian ESDM menargetkan 1.000 MW listrik di Pulau Jawa.

Acara yang dipusatkan di Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapten Mudita, Desa Adat panglipuran Kabupaten Bangli tersebut dihadiri oleh perwakilan Bupati dari Kabupaten-Kabupaten dari 31 Provinsi yang mendapatkan bantuan pembangunan pembangkit listrik dari EBT tahun anggaran 2013. Hadir pula para pejabat di

lingkungan Kementerian ESDM diantaranya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman.

Selepas penandatanganan nota kesepahaman antara Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dengan Bupati Bangli tentang Pengembangan Kawasan Energi Baru Terbarukan, acara dilanjutkan dengan tabur bunga ke Makam Kapten Mudita, Pahlawan nasional yang berjuang bersama I Gusti Ngurah Rai saat perang puputan mempertahankan kemerdekaan RI. Semangat bekerja keras untuk negeri itulah yang digunakan Menteri ESDM untuk memotivasi semua orang agar terus bekerja bagi bangsa dan negara. (PSJ)



Foto-foto suasana groundbreaking PLT Bionassa Bangli, PLTS dan PLTMH yang dibiayai oleh APBN KESDM TA 2013. Acara yang dipusatkan di Monumen Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapten Mudita, Desa Adat panglipuran Kabupaten Bangli.

Kementerian ESDM Unjuk Gigi di Pameran AITIS 2014



Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meresmikan APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014 yang diselenggarakan di JI EXPO Kemayoran Jakarta.

Untuk menjembatani komunikasi dan penyampaian informasi kepada calon investor dan Pemerintah Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berpartisipasi dalam pameran APKASI International Trade and Investment Summit (AITIS) 2014. Dalam pameran tersebut Kementerian ESDM yang terdiri dari tujuh unit Eselon I membuka stan berukuran 3x9 meter. Dikoordinasi oleh Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM beberapa unit eselon I seperti Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Mineral dan Batubara, Ditjen EBTKE, Badan Diklat ESDM, Badan Litbang ESDM dan BPH Migas berpartisipasi menyampaikan informasinya kepada masyarakat.

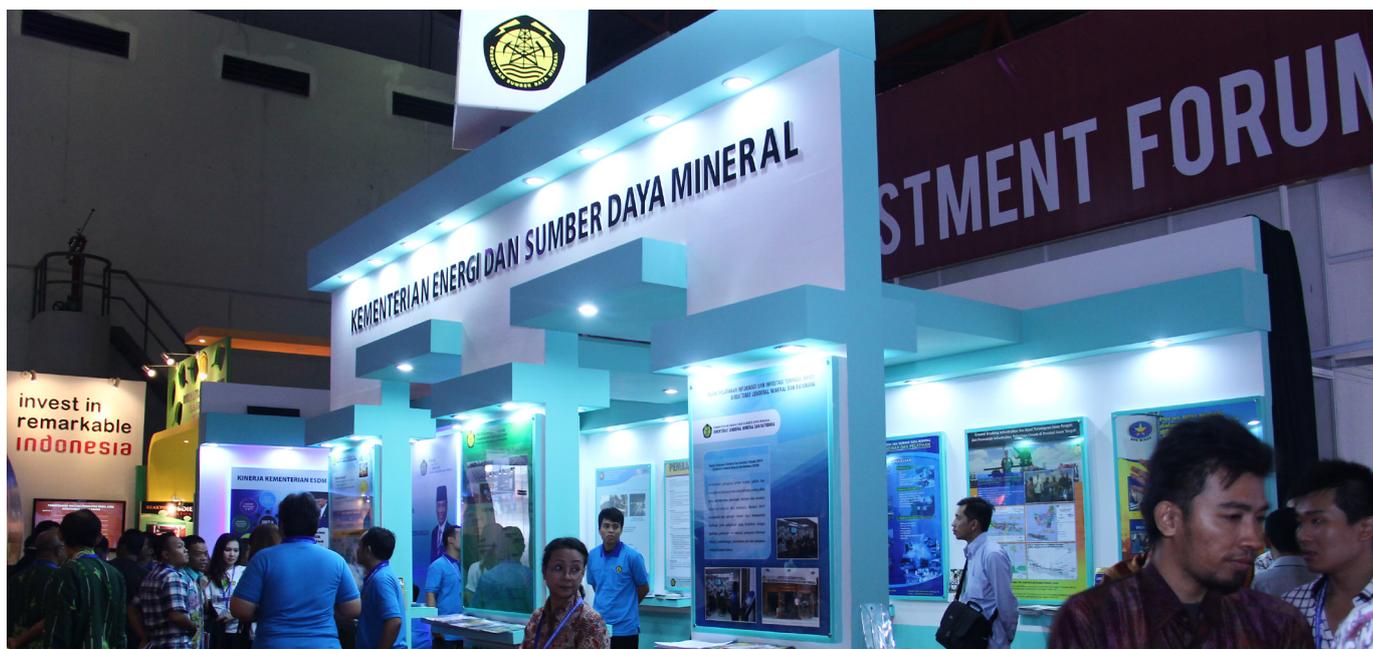
Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini digelar dari hari Senin (14/4) hingga Kamis (17/4) di Jakarta International Expo Kemayoran. Pameran perdagangan internasional dan pertemuan

forum investor ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam sambutannya Hatta meminta kepala daerah, pemimpin daerah, seperti Bupati untuk mempercepat izin usaha dan investasi. "Saya pesan betul kepada Pak Isran Noor (Ketua APKASI) melalui upaya mempercepat proses perizinan dan hambatan-hambatan," ujarnya.

la mengatakan, pelayanan terpadu dan kecepatan proses investasi sangat penting guna mendorong salah satunya konektivitas. Sehingga, pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN yang sebentar lagi berlaku. Hatta mencontohkan, proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Batang berkapasitas



Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mendampingi Duta Besar Aljazair untuk Indonesia mengunjungi stan Kementerian ESDM dalam pameran tersebut.



Pameran ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini digelar dari hari Senin (14/4) hingga Kamis (17/4) di Jakarta International Expo Kemayoran.

2 x 1.000 megawatt sampai saat ini belum selesai karena masalah perizinan lahan. Ia berharap persoalan seperti itu tidak terjadi lagi bila terdapat komunikasi yang baik. "Potong perizinan menjadi lebih simpel, serta memangkas izin yang bertele-tele agar cepat orang berinvestasi," lanjutnya. Menurutnya Proses investasi yang lebih cepat itu akan menolong sistem perdagangan dan sistem logistik nasional.

Tema yang diusung oleh Kementerian ESDM dalam pameran tersebut adalah Catur Dharma Energi. Catur Dharma energi tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 4051K/07/MEM/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Catur Dharma Energi. Empat poin penting dalam Catur Dharma Energi tersebut ialah : Tingkatkan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Kurangi impor Bahan Bakar Minyak, Kembangkan Energi Baru Terbarukan, dan Hemat Energi. Sesuai dengan tema Catur Dharma Energi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menampilkan beberapa capaian sub sektor ketenagalistrikan hingga akhir 2013

seperti Rasio Elektrifikasi yang mencapai 80,4%, penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.175 MW sehingga kapasitas terpasang total menjadi 46.428 MW, serta informasi mengenai percepatan pembangkit listrik Tahap II yang lebih banyak menggunakan energi baru dan terbarukan.

Ditjen Ketenagalistrikan juga terus menyampaikan kampanye penghematan energi,

khususnya energi listrik dengan membudayakan menggunakan lampu hemat energi dan mematikan lampu serta peralatan listrik lainnya jika tidak digunakan. (PSJ)

Penulis : Pandu Satria Jati B



Kementerian ESDM mengangkat tema Catur Dharma Energi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 4051K/07/MEM/2013 tanggal 27 Desember 2013.

DJK Selenggarakan Coffee Morning Penyesuaian TTL 2014

Penulis : Jackson Frans



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan dalam acara Coffee Morning Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014.



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman tengah berbincang bersama Wakil Menteri Keuangan Bambang Permedi.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada Kamis (17/4) mengadakan acara Coffee morning tentang Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara. Dalam acara tersebut, Ditjen Ketenagalistrikan mengundang berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah, jajaran PT PLN (Persero), para asosiasi industri, serta pelanggan listrik industri besar. Acara yang digelar di kantor Ditjen Ketenagalistrikan Kuningan, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan RI Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro selaku narasumber, serta Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji. Sosialisasi mengenai Permen ESDM sendiri disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra dan Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun.

Dalam sambutannya, Dirjen Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc menyampaikan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan rutin menyelenggarakan coffee morning sebagai sara penyampaian regulasi terbaru di sektor ketenagalistrikan. Menurutnya acara ini juga



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra melanjutkan presentasi dengan substansi pokok Penyesuaian tarif tenaga listrik.yang dilakukan secara bertahap setiap 2 (dua) bulan.



Coffee Morning yang diselenggarakan untuk mensosialisaikan peraturan dan kebijakan terbaru menjadi wadah bertemunya para pemangku kepentingan sub sektor ketenagalistrikan.

sebagai sarana komunikasi antar pemerintah, PT PLN, swasta, dan masyarakat. Permen ESDM Nomor 9 yang ditandatangani tanggal 1 April 2014 lalu oleh Menteri ESDM Jero Wacik menurut Jarman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Pemerintah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Menurut Jarman, dengan penghapusan subsidi listrik, alokasi dana dapat untuk menjamin rasio elektrifikasi dalam

negeri pada tahun 2020 akan mendekati 99%. "Dana subsidi listrik akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi," ujarnya.

Menurut Jarman, Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2014 ini keluar sesuai dengan hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM tanggal 21 Januari 2014. "Penyesuaian tarif listrik harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari DPR," kata Jarman. Menurutnya Komisi VII DPR RI menerima dan menyetujui usulan Pemerintah untuk melakukan penghapusan

subsidi listrik secara bertahap bagi pelanggan industri menengah (I-3) yang go public dan Industri besar (I-4) serta penerapan tariff adjustment terhadap pelanggan listrik non subsidi rumah tangga besar (R-3), bisnis menengah (B-2), bisnis besar (B-3) dan kantor pemerintah sedang (P-1) terhitung tanggal 1 Mei 2014 setiap 2 (dua) bulan sampai dengan Desember 2014.

Satya Zulfanitra melanjutkan presentasi dengan substansi pokok Penyesuaian tarif tenaga listrik. Secara garis besar, penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan secara bertahap setiap 2 (dua) bulan terhadap pelanggan industri menengah (I-3) daya di atas 200 kVA go public, dan pelanggan industri besar (I-4) daya 30.000 kVA, serta penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk golongan pelanggan rumah tangga besar (R-3) daya 6.600 VA ke atas, bisnis menengah (B-2) daya 6.600 VA s.d 200 kVA, bisnis besar (B-3) daya di atas 200 kVA, dan kantor pemerintah sedang (P-1) daya 6.600 VA s.d 200 kVA. Penjelasan teknis mengenai peraturan Menteri ini sendiri disampaikan oleh Benny Marbun. Dalam coffee morning tersebut, beberapa undangan dari kalangan industri memanfaatkan waktu yang ada untuk menanyakan dan mendapatkan jawaban dari kedua narasumber. Selepas presentasi kedua narasumber, Wamen Keuangan Bambang Permadi menyampaikan presentasi mengenai kondisi ekonomi makro Indonesia dengan adanya penyesuaian tarif listrik. Bambang optimis, dengan komunikasi intensif antara pemerintah, PT PLN, dan pelanggan listrik, sistem ekonomi makro Indonesia dapat terus berjalan baik. (PSJ)



Salah seorang peserta coffee morning menyampaikan pertanyaan seputar kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik.

Pembangunan PLTP Ditargetkan 570 MW Pertahun

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mendapatkan kenang-kenangan usai memberikan motivasi dan pengarahan pada karyawan PT Geo Dipa (Persero), Selasa (22/4).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai rata-rata 6% pertahun dan pertumbuhan penduduk 1,7% pertahun merupakan modal yang sangat menarik bagi Investor untuk berinvestasi Indonesia. Namun hal tersebut perlu didukung dengan adanya listrik. Untuk itu pemerintah menargetkan rata-rata penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 5.700 MW per tahun. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal

Ketenagalistrikan Ir Jarman MSC dalam acara Coffee Morning PT Geo Dipa Energi (Persero), Selasa (22/4).

Dari 100% bauran energi untuk pembangkit listrik, sepertepuluhnya ditargetkan dari panas bumi (geothermal). "Sesuai dengan roadmap, paling tidak sepuluh persennya dari Geothermal," ujar Jarman. Sehingga menurutnya dari 5.700 MW kebutuhan listrik per tahun, paling

tidak perlu diinstall kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 570 MW per tahun. Hal ini tentu membutuhkan kerja keras dan komitmen bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan energi listrik dari panas bumi termasuk PT Geo Dipa Energi.

Bisnis Panas Bumi sebagai pembangkit listrik menurut Jarman merupakan hal yang strategis sebab pemerintah sangat mendukung



Para karyawan PT Geo Dipa Energi memanjatkan doa untuk kemajuan perusahaan dan energi panas bumi di Indonesia.



Dirjen Ketenagalistrikan berharap PT Geo Dipa Energi dapat mengembangkan PLTP dari sumber-sumber geothermal di luar kawasan Patuha dan Dieng.

pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Belum lagi potensi panas bumi di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Jarman mengingatkan kepada sejumlah karyawan PT Geo DIPA Energi, bahwa awal dibentuk perusahaan yang saat ini telah mejadi BUMN ini adalah untuk tujuan mulia, dimana aset-aset panas bumi di Indonesia dapat dioperasikan dan dikembangkan. PT Geo Dipa Energi menurut Jarman telah memiliki nilai-nilai (value) untuk berkomitmen mengembangkan panas bumi sebagai pembangkit listrik. "Tinggal implementasi dari values yang telah dimiliki,"ujarnya.

Menurut Jarman terdapat empat hal yang perlu dilakukan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama adalah Charter Compliance, yaitu kepatuhan

perusahaan terhadap anggaran dasar perusahaan. Hal kedua yang diingatkan Jarman adalah Good Corporate Compliance, yaitu agar perusahaan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab kepada publik. Yang ketiga perusahaan perlu menerapkan Sector Compliance, yaitu pemain bisnis di sektor pembangkitan panas bumi menerapkan aturan main sehingga dapat menghindari terjadinya pelanggaran. Terakhir, perusahaan perlu membangun Basic Communication, yaitu komunikasi bisnis baik internal maupun eksternal perusahaan.

Dalam coffee morning tersebut Dirjen Ketenagalistrikan berharap PT Geo Dipa Energi dapat mengembangkan PLTP dari sumber-sumber geothermal di luar kawasan Patuha dan Dieng. PT Geo

Dipa Energi sendiri saat ini tengah mengoperasikan PLTP Dieng I (60 MWe) serta tengah membangun Patuha Unit I (55 MW) yang akan segera COD tahun ini. Total potensi panas bumi di Dieng sebesar 300 Mwe sedangkan di Patuha sebesar 400 MWe. (PSJ)



Dirjen Ketenagalistrikan berharap PT Geo Dipa Energi dapat mengembangkan PLTP dari sumber-sumber geothermal di luar kawasan Patuha dan Dieng.

Peluang Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan Terbuka

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman mendapat kenang-kenangan usai membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI) Rabu (23/4).

Seiring meningkatnya konsumsi listrik, terdapat kebutuhan listrik yang tidak dapat dipenuhi oleh PT PLN. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan aturan untuk mempermudah izin-izin swasta dapat membikin pembangkit listrik mandiri untuk melistriki suatu wilayah usaha. Hal ini merupakan peluang bisnis dan investasi

bagi para kontraktor di sektor ketenagalistrikan. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman M.Sc saat membuka Rapat Kerja Nasional Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI) Rabu (23/4).

Acara yang diselenggarakan di

kantor Pusdiklat PT PLN, Ragunan, Jakarta Selatan, ini dihadiri oleh puluhan pengurus dan anggota HIKKMI dari berbagai daerah. Menurut Jarman, dengan kebutuhan pembangunan pembangkit listrik 5.700 MW pertahun, kebutuhan investasi listrik diperkirakan 12-15 Miliar Dollar pertahunnya. Di satu sisi kemampuan neraca PT PLN terbatas sehingga dibutuhkan investasi dari swasta. Swasta dapat membangun pembangkit dan mendistribusikannya dalam suatu wilayah usaha. "Tempatnya bisa tidak dalam satu tempat," ujar Jarman. Menurutnya peraturan yang tengah disiapkan pemerintah dan diharapkan dapat diimplementasikan tahun 2018 nanti. Menurut Jarman, Subsidi listrik Industri pelan-pelan akan dicabut dan diganti sistem intensif. Industri dapat memilih untuk menggunakan listrik dari PLN



Suasana Rapat Kerja Nasional Himpunan Kontraktor Ketenagalistrikan dan Mekanikal Indonesia (HIKKMI) yang mengangkat tema Kemitraan yang Profesional.



Sertifikasi di bidang ketenagalistrikan menjadi sangat penting terlebih dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin terbuka.

maupun dari swasta mandiri.

Sertifikasi di bidang ketenagalistrikan menurut Jarman menjadi sangat penting terlebih dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin terbuka. Menurut Jarman pemerintah telah menerbitkan permen ESDM Nomor 5 tahun 2014 tentang tata cara akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. Berdasarkan peraturan tersebut, badan usaha tenaga listrik akan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Menurut LSBU ini diakreditasi oleh pemerintah melalui panitia akreditasi ketenagalistrikan (PAK). Menurut Jarman hal ini berlaku pula untuk tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan peraturan tersebut, tenaga teknik di sektor ketenagalistrikan harus

mempunyai Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik (SKTT).

Masih menurut Jarman, Ditjen Ketenagalistrikan tengah menyiapkan code number untuk sertifikasi. Badan usaha boleh dibentuk di setiap Kabupaten. Kode ini akan diatur berdasarkan kode kabupaten yang telah ada secara nasional. "Nantinya setiap badan usaha yang telah tersertifikasi mempunyai nomer kode sendiri-sendiri," tegasnya. Database mengenai nomor kode tersebut akan disimpan di Ditjen Ketenagalistrikan dan dapat diakses oleh semua orang. Ia menambahkan, sistem akreditasi ketenagalistrikan akan ditata dengan baik sehingga setara dengan akreditasi di luar negeri.

Ketua Umum HIKKMI Agus Sofiandi dalam sambutannya

menyampaikan bahwa tema rakernas HIKKMI ini adalah Kemitraan yang Profesional. Ia ingin agar para kontraktor dapat menandatangani kontrak-kontrak dengan profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dirjen berharap Rakernas ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi HIKKMI sehingga sesuai dengan amanat UU ketenagalistrikan. HIKKMI sendiri baru merupakan asosiasi baru di sektor ketenagalistrikan yang dideklarasikan pada 1 Oktober 2012 lalu. (PSJ)

Hindari Defisit Listrik, Pembangunan Pembangkit Harus Tepat Waktu

Penulis : Pandu Satria Jati B

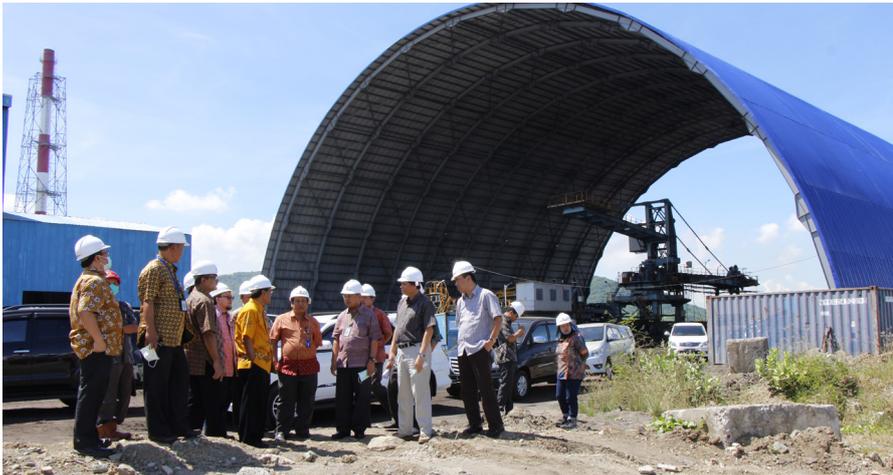


Foto-foto staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan KESDM Ronggo Kuncahyo bersama rombongan saat berkunjung ke PLTU 2 NTB (2 x 25 MW) yang terletak di Jeranjang Lombok, Jumat (25/4).

LOMBOK - Pembangunan pembangkit-pembangkit listrik harus diselesaikan tepat waktu. Jika PT PLN (Persero) mengalami hambatan-hambatan diminta untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo saat berkunjung ke PLTU 2 NTB (2 x 25 MW) yang terletak di Jeranjang Lombok, Jumat (25/4). Ronggo memastikan pemerintah akan mengupayakan berbagai cara agar pemangkit listrik yang dibangun oleh PLN maupun Independent Power Producer (IPP) dapat selesai tepat waktu.

Selain Ronggo hadir dalam kunjungan tersebut Kasubdit Penyiapan Program Ketenagalistrkan Wanhar, Kasubdit Perizinan Ketenagalistrkan Tri Handoko, Kasubdit Lingkungan Ketenagalistrkan Hanat Hamidi serta para pejabat dan staf Ditjen Ketenagalistrkan. Dirjen Ketenagalistrkan Jarman yang awalnya terjadwal menghadiri kunjungan tersebut harus menunda kedatangannya karena menghadiri rapat penyelesaian PLTU Batang di Jakarta.

Tiba di lokasi, rombongan mendapat penjelasan dari General Manajer Wilayah NTB Andi Lakipadadah mengenai kondisi kelistrikan di NTB. Menurutnya Wilayah NTB terdiri dari tiga area yaitu area Mataram, Sumbawa, dan Bima, serta Sektor Pembangkitan Lombok dan APDP Mataram. Ia pun memaparkan rasio elektrifikasi di propinsi yang beribukota di



Rombongan mendapat penjelasan dari General Manajer Wilayah NTB Andi Lakipadadah mengenai kondisi kelistrikan di NTB.

Mataram yang saat ini mencapai 64,4%. RE di Kota Mataram sendiri saat ini mencapai 98,2% sedangkan beberapa Kabupaten lainnya masih di bawah rata-rata nasional atau di bawah 80,5%

Setelah memaparkan kondisi kelistrikan di NTB, Andi memaparkan kemajuan dan hambatan-hambatan mengenai proyek PLTU 2 NTB yang telah mencapai kemajuan sekitar 95% ini. Ia pun memaparkan proyek PLTU Lombok FTP 2 (2x50 MW) yang terletak di Sambelia Lombok

Timur. Lahan seluas 19 Ha telah disiapkan untuk membangun PLTU yang akan melistriki Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya ini. Ronggo memastikan pemerintah terus berupaya untuk menghapus subsidi yang tidak tepat sasaran dan menggantinya dengan alokasi dana untuk pembangunan pembangkit-pembangkit dan jaringan tenaga listrik. "Kebutuhan listrik selalu bertambah. Untuk itu pembangunan harus terus dilakukan agar tidak terjadi defisit listrik," ujarnya. Sesuai

diskusi, rombongan melakukan kunjungan lapangan ke PLTU 2 NTB dan kawasan yang akan dibangun PLTU Sambelia. Sabtu rombongan bertolak ke pulau Sumbawa untuk meninjau pembangunan PLTU Bima bersama Dirjen Ketenagalistrikan Jarman. (PSJ)



Rombongan meninjau Lahan seluas 19 Ha telah disiapkan untuk PLTU Lombok FTP 2 (2x50 MW) yang terletak di Sambelia Lombok Timur. PLTU ini akan melistriki Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya.

NTB Kebut Pembangunan Pembangkit Listrik Non Migas

Penulis : Pandu Satria Jati B

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini sedang menyelesaikan berbagai proyek pembangkit listrik dari bahan bakar non migas. Untuk itu berbagai pembangkit listrik dari batubara ditargetkan selesai tahun ini untuk menggantikan pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM. Hal tersebut disampaikan oleh General Manajer PT PLN (Persero) Wilayah NTB Andi Lakipapadah saat menerima kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan Jarman beserta rombongan di Bandar Udara Muhammad Salahuddin, Bima NTB, Sabtu (26/4).

Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk memonitoring pembangunan pembangkit-pembangkit listrik di Provinsi NTB serta memberikan motivasi untuk para pekerja. Dirjen Ketenagalistrikan didampingi oleh Staf Ahli menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo, Kasubdit Penyiapan Program Tenaga Listrik Wanhar, Kasubdit Pelayanan dan Bimbingan Usaha



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman meninjau pembangunan PLTU Bima (2 x 10 MW) yang pembangunannya dikerjakan oleh PT Rekadaya Elekrika.

Tenaga Listrik Tri Handoko, Kasubdit Perlindungan Lingkungan Tenaga Listrik Hanat Hamidi serta para pejabat dan staf Ditjen Ketenagalistrikan.

Menurut Jarman, Rasio Elektrifikasi NTB yang masih di bawah rata-rata nasional perlu mendapat perhatian dengan segera beroperasinya pembangkit-pembangkit listrik di Provinsi NTB. "Pembangkit BBM harus segera diganti dengan Batubara dan EBT," ujar Jarman.

Di Kabupaten Bima sendiri saat ini tengah dibangun PLTU berkapasitas 2 x 10 MW yang pembangunannya dilanjutkan oleh PT Rekadaya Elekrika. "Kontraktor mengalami kesulitan finansial sehingga pelaksanaan konstruksi sempat terhenti," ujar Andi. Berdasarkan pemaparan PT PLN Area Bima, PLTU Bima Unit 1 ditargetkan beroperasi 14 September 2014 dan Unit beroperasi 14 Desember 2014.

Provinsi NTB mempunyai luas 20.158,15 km² dengan jumlah penduduk 4.138.060 jiwa. Provinsi yang memiliki 8 Kabupaten dan 2 Kota memiliki 117 Kecamatan dan 913 Kelurahan. Tahun 2013 lalu, pemerintah mengucurkan dana APBN untuk pembangunan listrik perdesaan di Provinsi tersebut untuk membangun Jaringan Tegangan Menengah sepanjang 253.792 kms, Jaringan Tegangan Rendah sepanjang 146.151 kms, serta membangun gardu distribusi sebanyak 83 buah dengan kapasitas total 6.830 MVA. Selain itu pemerintah telah melistriki masyarakat tidak mampu



Foto rombongan Dirjen Ketenagalistrikan yang didampingi oleh Staf Ahli menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Sosial Kemasyarakatan Ronggo Kuncahyo meninjau PLTU Bima.

dalam program listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu dan nelayan sebanyak 2.388 Rumah Tangga Sasaran.

Acara dilanjutkan dengan mengunjungi proyek PLTU Bima yang terletak sekitar 25 km dari Bandara Muhammad Salahuddin. Di sana Dirjen Ketenagalistrikan mendapatkan informasi seputar pembangunan pembangkit yang akan melistriki sistem sumbawa. (PSJ)



PLTU Bima terletak sekitar 25 km dari Bandara Muhammad Salahuddin dan ditargetkan selesai akhir tahun 2014.

Galeri Foto Kunjungan Dirjen Ketenagalistrikan Ke PLTU Bima NTB 26 April 2014



Pemerintah Siapkan Regulasi Power Wheeling

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan menjadi narasumber dalam Diskusi Nasional 'Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi' yang diselenggarakan oleh Majalah Tambang.



Pemberian kenang-kenangan oleh Majalah Tambang kepada narasumber Diskusi Nasional.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan mengenai power wheeling. Dengan skema ini Pemegang Izin Operasi Ketenagalistrikan sebagai pemilik captive power menyewa transmisi PLN untuk menyalurkan tenaga listrik yang dibangun ke perusahaan sendiri di lokasi yang berbeda. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc

dalam Diskusi Nasional 'Hilirisasi Mineral, Kelistrikan, dan Solusi' di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu (30/4). "Pabrik atau industri yang memiliki izin operasi dapat membangun pembangkit tenaga listrik di tempat yang berbeda dari lokasi industrinya," ungkap Jarman.

Perusahaan tambang yang punya smelter di tengah pulau serta punya sumber daya air di tempat

lain, dapat membangun PLTA untuk melistriki smelternya. Perusahaan tersebut menyewa jaringan transmisi milik PT PLN. "Yang dibayar ke PLN adalah sewa transmisi dan keandalan," ujar Jarman. Model kedua untuk Power wheeling menurut Jarman adalah pemegang wilayah usaha menyewa transmisi PLN untuk menyalurkan tenaga listrik yang dibangun di luar wilayah usahanya. Pemegang Izin



Peserta Diskusi Nasional menyampaikan pertanyaan dan tanggapan atas kebijakan ketenagalistrikan yang berkaitan dengan hilirisasi mineral.



Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi tersebut juga dapat membeli dari perusahaan lain di luar wilayah usahanya (swasta/ excess) melalui sewa jaringan PLN.

Dengan skema power wheeling, kebutuhan listrik yang tidak teralokasikan oleh PT PLN dan IPP dapat terpenuhi. Menurut Jarman, total tambahan kapasitas sampai dengan tahun 2022 sekitar 60 GW. Alokasi proyek pembangkit PLN dan IPP hanya untuk proyek-proyek pembangkit yang telah on going dan committed. Proyek yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya disebut proyek Unallocated (PLN, IPP, PPU, atau IO non BBM). Jarman mengajak perusahaan-perusahaan menggunakan skema power wheeling untuk menghemat biaya sekaligus membantu program pemerintah mencukupi unallocated demand. "Peraturannya sedang disusun, akhir tahun ini akan selesai," tuturnya.



Dalam diskusi tersebut, hadir pula menyampaikan paparannya Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Dede I Suhendra dan Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tato Miraza. Acara diskusi nasional ini diselenggarakan Majalah TAMBANG dan dihadiri oleh para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di sektor pertambangan. (PSJ)



Suasana Diskusi nasional yang diselenggarakan Majalah Tambang. Dirjen Ketenagalistrikan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan mengenai power wheeling.

Pemerintah Ubah Paradigma Pengelolaan Energi

Penulis : Pandu Satria Jati B

Pemerintah melalui Kementerian ESDM merubah paradigma pengelolaan energi dari supply side management menjadi demand side management. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan konservasi energi sehingga tercapainya kebutuhan energi yang efisien. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ir Arief Indarto MM dalam pembukaan Indonesia Electro Summit (IES) 2014 dan Seminar Nasional Revolusi Energi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Elektro Sekolah Tinggi Teknik (STT), Senin (5/5).

Menurut Arief, kebutuhan energi belum efisien. "Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil dengan biaya berapapun dan malah disubsidi, energi terbarukan hanya sebagai alternatif," ujar Arief. Dengan kata lain paradigma pengelolaan energi kita selama ini lebih cenderung pada supply side management.

Dalam sambutannya Arief menyampaikan bahwa tema seminar nasional IES yaitu 'Mewujudkan Kedaulatan Energi Nasional dengan Memaksimalkan Potensi Energi Gas Bumi dan Panas Bumi' juga menjadi perhatian pemerintah. "Tema yang diangkat dalam seminar nasional oleh adik-adik mahasiswa ini sejalan dengan semangat yang diusung dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah disetujui DPR RI bulan Januari 2014 yang lalu," ujarnya.

Menurut Arief, KEN mengamanatkan untuk memenuhi ketersediaan energi untuk



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Arief Indarto menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Revolusi Energi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Elektro Sekolah Tinggi Teknik (STT), Senin (5/5). Dalam presentasinya, Sesditjen menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kementerian ESDM merubah paradigma pengelolaan energi dari supply side management menjadi demand side management.

kebutuhan nasional melalui upaya salah satunya yaitu mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batubara. Prioritas pengembangan energi dilakukan melalui pengembangan energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan yang didasarkan pada prinsip antara lain memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian dan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru.

Dalam sepuluh tahun ke depan diproyeksikan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sekitar 60 GW, dimana sekitar 15% terdiri dari PLTG/PLTGU/ PLTMG dan sekitar 10% terdiri dari PLTP. PLTG/ PLTGU/PLTMG akan dioperasikan sebagai pembangkit load follower ataupun beban puncak dan PLTP sebagai pembangkit pemikul beban dasar. Dengan pengembangan pembangkit berbahan bakar gas tersebut maka kebutuhan gas untuk pembangkit akan terus meningkat, sampai dengan tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 5,3 TSCF. (PSJ)



Suasana Indonesia Electro Summit (IES) 2014 di Seminar Nasional Revolusi Energi yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Elektro Sekolah Tinggi Teknik (STT). Acara tahunan STT PLN ini dibuka dengan penampilan Paduan Suara STT PLN dan pengalungan identitas peserta oleh Sesditjen Ketenagalistrikan.

Pemerintah Terbitkan Peraturan Terbaru untuk Tambah Kapasitas Listrik

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan sambutan dalam Coffee Morning mengenai sosialisasi tiga peraturan terbaru di sub sektor ketenagalistrikan, Jumat (9/5).

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekitar 6% per tahun, pertambahan demografi 1,7% pertahun, pertumbuhan listrik antara 7,5-8,5% pertahun, diperlukan tambahan kapasitas listrik sekitar 6.000 MW per tahun. Untuk itu penerbitan peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan produksi listrik terus dilakukan dan disampaikan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir. Jarman MSc dalam Coffee Morning mengenai sosialisasi tiga peraturan terbaru di sub sektor ketenagalistrikan, Jumat (9/5).

Tiga peraturan terbaru yang disosialisasikan dalam Coffee Morning ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang, dan Keputusan Menteri ESDM no 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PT

PLN dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Menurut Dirjen Ketenagalistrikan, total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik nasional pada akhir tahun 2013 mencapai sekitar 49 GW yang terdiri dari pembangkit PLN sekitar 72%, Independent Power Producers (IPP) 21%, Private Power Utility (PPU) 4%, dan Izin Operasi (IO) non BBM sekitar 3%. Pada akhir tahun 2018 diharapkan porsi PPU dan IO non BBM ini meningkat menjadi

sekitar 12%. Peningkatan tersebut adalah dari proyek yang belum ditetapkan pengembang maupun sumber pendanaannya (proyek Unallocated).

Untuk meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik, pemerintah terus berupaya melakukan diversifikasi energi primer dalam pembangkitan tenaga listrik. Saat ini porsi pemakaian BBM masih relatif tinggi (12,5 %), dan diharapkan pada tahun 2.022 porsi pemakaian BBM dapat



Dirjen Ketenagalistrikan tengah berbincang dengan Raden Pardede (Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional) yang memaparkan mengenai outlook ekonomi Indonesia.



Tiga peraturan terbaru yang disosialisasikan dalam Coffee Morning ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang, dan Keputusan Menteri ESDM no 2186.K/91/MEM/2014 tentang Penugasan Khusus Kepada PT PLN dalam Rangka Mempercepat Proses Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

ditekan menjadi 1,7%. Perbaikan bauran energi pada pembangkitan tenaga listrik dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan gas, peningkatan pemanfaatan batubara (termasuk mulut tambang) dan pengembangan pembangkit dari energi terbarukan, memberikan prioritas pada gas dan batubara untuk menurunkan ketergantungan pada BBM pada pembangkitan tenaga listrik, serta menggunakan batubara digunakan untuk pembangkit base load dan gas untuk pembangkit peak load/load follower.

Hadir dalam Coffee Morning tersebut para pejabat dari Kementerian ESDM, Sekretariat Kabinet, Kemenko Perekonomian, Kementerian Negara BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian PPN/Bappenas, BPN, BKPM, BPS, serta Para Kepala Dinas ESDM seluruh Indonesia. Hadir pula jajaran PT PLN (Persero), para pemangku kepentingan bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, serta para Pimpinan Produsen Batubara. Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional Raden Pardede hadir memaparkan mengenai outlook ekonomi Indonesia. Pardede memberikan gambaran

mengenai hubungan pertumbuhan ekonomi dan pasokan listrik serta menyuntikkan rasa optimis kepada

para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. (PSJ)



Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menanggapi presentasi dari Raden Pardede (atas). Presentasi mengenai Tata Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang (bawah).

Menteri ESDM Tonton Film Bersama Para Pelajar

Penulis : Pandu Satria Jati B



Menteri ESDM Jero Wacik memberikan motivasi kepada para pelajar yang menyaksikan pemutaran film Pulau Bintang di Studio XXI Mal Epicentrum.

Sore itu, Studio XXI Mal Epicentrum ramai oleh pelajar berseragam putih-merah dan putih-biru. Mereka ramai bermain-main di lobby bioskop dan antusias mencoba foto box serta berbagai permainan edukatif yang dipasang khusus untuk mereka. Selain pelajar, studio juga ramai oleh pengisi suara film "Pulau Bintang", para crew, serta para wartawan. Tak berapa lama, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo tiba di lokasi studio XXI. Para pelajar itu pun dengan tertib masuk ke

dalam studio untuk mendengarkan sambutan dari Wamen ESDM. Para pelajar tersebut dari berbagai sekolah di DKI Jakarta yang dipilih menjadi duta energi pada pencahangan Gerakan Sadar Energi yang diluncurkan oleh Wakil Menteri ESDM, Selasa (3/6).

Menurut Susilo, Gerakan Sadar Energi ini terinspirasi oleh Catur Dharma Energi yang dicetuskan Menteri ESDM Jero Wacik. Empat tugas utama Indonesia di bidang energi atau Catur Dharma Energi

tersebut antara lain : meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM), mendorong secara masif pengembangan energi baru dan terbarukan, serta melakukan gerakan hemat energi. Susilo meminta para pelajar untuk ikut serta dalam upaya hemat energi untuk kesejahteraan rakyat. Kondisi Wakil Menteri ESDM yang kurang sehat membuat ia harus izin dengan para pelajar meninggalkan lokasi studio XXI. Namun ternyata mereka mendapat kabar gembira, bahwa Menteri ESDM Jero Wacik yang sedianya tidak dapat menghadiri launching gerakan sadar energi karena harus rapat dengan DPR RI, akhirnya datang dan ikut menyaksikan film "Pulau Bintang".

"Pulau Bintang" bercerita tentang kakak-adik bernama Kaya dan Umay yang berlibur ke satu daerah. Berbeda dengan kehidupan yang biasa mereka jalani di kota, kehidupan di daerah itu justru mengandalkan energi alternatif



Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo bersama para pelajar yang menjadi Duta Energi pada pencahangan Gerakan Sadar Energi. Selasa (3/6)



Studio XXI Mal Epicentrum ramai oleh pelajar yang henak menyaksikan pemutaran film Pulau Bintang.

sebagai sumber kehidupan, seperti memanfaatkan kotoran sapi untuk memasak, juga tenaga angin sebagai pembangkit listrik. Di daerah tersebut energi juga sangat terjaga. Tidak seperti di kota-kota besar yang justru banyak dihambur-hamburkan. "Pulau Bintang" disutradarai oleh Ray Nayoan dan didukung oleh sejumlah nama seperti Butet Kertaradjasa, Debra Yatim, Umay Shihab, Chantiqa dan David Tarigan. Wamen ESDM Susilo Siswoutomo menjadi salah satu penulis naskah dalam film tersebut.

Mengenai pemilihan film animasi, diutarakan Jero, lantaran pihaknya memang ingin menysasar anak-anak. Ia ingin gerakan sadar energi bisa tertanam dari sedini mungkin. "Kalau dari kecil sudah sadar energi, akan baik untuk generasi ke depan," kata dia. Melalui Gerakan Sadar Energi diharapkan masyarakat, apapun latar belakangnya, tidak hanya secara kognitif menyadari cara hidup hemat energi, tetapi juga dalam perilaku sehari-hari (afektif dan konatif).

Beragam kegiatan dalam Gerakan Sadar Energi yang telah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2013, diantaranya penanaman kesadaran (kognitif) pada masyarakat melalui

komik Petualangan Energi, buku Mozaik Minyak dan Gas Bumi Indonesia, dan film animasi. "Komik dan animasi tersebut menjadi media kampanye penyadaran publik yang luar biasa efektifitasnya. Selain ampuh untuk memperluas perspektif publik mengenai persoalan energi dan lingkungan, media ini menjadi alat sosialisasi sejak anak berusia dini", lanjut Menteri ESDM.

Selain menonton film "Pulau Bintang", juga ada beberapa kegiatan yang berorientasi pada tindakan (afektif dan konatif) seperti Dongeng Kebangsaan: Energi untuk Kelangsungan Hidup Bangsa, New Leaf Summer Camp (workshop untuk pelajar SMA tentang pembuatan film bertema energi), dan Festival Film Sadar Energi di beberapa kota di Tanah Air. "Gerakan ini akan dilakukan terus sampai terbangun budaya sadar energi", ujar Menteri. (PSJ)



Foto-foto penanaman Gerakan Sadar Energi oleh Menteri dan Wakil menteri ESDM di Studio Epicentrum, Kuningan Jakarta. Selain pemutaran film, acara juga dimeriahkan dengan peluncuran buku, pertunjukan musik dan foto box.

Pemerintah Beri Prioritas Pembangkit EBT

Penulis : Pandu Satria Jati B



Seminar dan diskusi dalam rangkaian EBTKE Conex 2014 di JCC Jakarta, Rabu (4/2).



Dalam seminar tersebut, Dirjen Ketenagalistrikan menyampaikan bahwa penambahan rasio pembangkit listrik dari energi baru terbarukan merupakan tantangan yang harus dijawab pemerintah selain menargetkan rasio elektrifikasi 99% di tahun 2020.

Pemerintah memberikan prioritas pembangunan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT). Pembangunan energi setempat khususnya di daerah remote, harus didorong. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman dalam seminar yang diselenggarakan oleh panitia EBTKE Conex 2014 di JCC Jakarta, Rabu (4/2). Menurut Jarman, target pemerintah untuk tambahan kapasitas pembangkit listrik selama sepuluh tahun ke depan adalah 57 hingga 60 GW. Sehingga tiap tahun butuh tambahan kapasitas sebesar 5.700 MW dimana 20%-25% nya berasal dari EBT. "Kira-kira 1.200 Mwnya dari EBT" ujar Dirjen. Untuk itu pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik panas bumi sebesar 300 MW setiap tahunnya.

Menurut Jarman penambahan rasio pembangkit listrik dari energi baru terbarukan merupakan tantangan yang harus dijawab pemerintah selain menargetkan rasio elektrifikasi 99% di tahun 2020. Pembangkit listrik yang ramah lingkungan

harus dikembangkan oleh semua negara di dunia, "Pembangunan pembangkit listrik tidak boleh hanya melihat masalah list cost, tapi juga masalah emisi," ujarnya. Untuk itu menurut Jarman pemerintah telah mencanangkan program percepatan pembangkit listrik tahap II (FTP II). "Dari 17.000 MW total pembangkit, 4700 MW nya berasal dari geothermal," ungkapnya. Pemerintah juga menyiapkan feed in tarif pembangkit listrik dari hydro maupun biomassa sehingga diharapkan para investor mau untuk berinvestasi di sektor EBT. Khusus untuk energi baru, penentuan pemenang bisa tunjuk langsung. Pembangkit hydro yang sudah ada izin operasi dari Bupati atau Gubernur dan secara sistem bisa masuk ke sistem PLN, maka langsung bisa disetujui. Jarman memberi contoh PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan (500 MW) yang mekanismenya ditunjuk langsung. Persetujuan untuk perizinan di Ditjen Ketenagalistrikan sendiri menurut Jarman tidak akan kurang dari satu minggu.

Menurut Jarman meskipun mahal, pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi setempat merupakan investasi jangka panjang jika dibandingkan energi fosil. "Secara jangka panjang energi baru lebih sustain dari pada fosil," ujarnya. Meskipun saat ini harga fosil seperti gas dan batubara masih murah, namun menurut Jarman suatu saat akan terus naik. Acara The 3rd Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indo EBTKE ConEx) 2014 ini dibuka oleh menteri ESDM Jero Wacik.

Menteri ESDM mengajak kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait untuk optimis mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia. Acara yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM dengan menggandeng Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia dan Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang energi baru, terbarukan dan konservasi energi secara keseluruhan di taraf nasional maupun internasional. (PSJ)

Kementerian KUKM Dukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan



Menteri ESDM Jero Wacik bersama Menteri KUKM Syarifuddin Hasan se usai menandatangani MOU penyediaan dan pemanfaatan EBT dengan memberdayakan koperasi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) berkomitmen mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan. Penyediaan bahan baku (sisi hilir) untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) hingga pemanfaatan energi (sisi hilir) akan didukung oleh Kementerian KUKM. Butir kesepakatan tersebut tertuang dalam kesepakatan bersama (MOU) yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri KUKM Syarifuddin Hasan, Selasa (17/6).

Dalam laporannya, Dirjen EBTKE Rida Mulyana memaparkan bahwa tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan EBT dengan memperdayakan masyarakat melalui koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut Rida menyampaikan bahwa kerjasama tersebut bersifat fisik dan kegiatan yang bersifat non fisik. "Kegiatan yang bersifat fisik meliputi pengadaan dan atau pembangunan fasilitas/

sarana penyediaan energi dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan, termasuk pengadaan dan atau penyediaan bahan baku bioenergi," ujarnya. Sedangkan pada kegiatan non fisik menurut Rida meliputi penyiapan dan pemberdayaan lembaga pengelola fasilitas/sarana penyediaan energi dari sumber-sumber energi baru dan terbarukan, pemberdayaan koperasi, unit usaha kecil dan menengah, serta dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan kegiatan bersama sekaligus sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kerjasama ini telah terbentuk kelompok kerja dari Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dan Deputi Bidang Produksi Kementerian KUKM. "Kesepakatan bersama ini dilaksanakan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang," ujar Rida. Sementara itu Menteri KUKM optimis bahwa potensi KUKM yang membawahi pelaku usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 58,5 juta dan 203.701 koperasi seluruh Indonesia. Dengan kekuatan para pelaku usaha kecil dan menengah yang tumbuh dengan cepat karena

tidak terpengaruh dengan kenaikan kurs dollar. Para pelaku usaha kecil dan menengah tersebut merupakan suatu kekuatan untuk mengembangkan peningkatan energi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam sambutannya Menteri ESDM Jero Wacik menekankan bahwa visi Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Kesejahteraan Rakyat harus dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan mengajak Kementerian KUKM yang memiliki jaringan dengan para pelaku usaha kecil dan menengah untuk memanfaatkan potensi EBT menjadi energi yang murah. Menurutnya Kementerian ESDM telah menerbitkan berbagai peraturan guna meningkatkan potensi EBT, salah satunya dengan menerbitkan Permen harga jual dari pembangkit EBT. Menteri berharap dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini akan terjadi sinkronisasi dan sinergitas kegiatan diantara kedua kementerian dalam rangka pengembangan energi baru dan energi terbarukan melalui pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan ketahanan energi, mendorong perekonomian masyarakat, dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. (PSJ)

Penulis : Pandu Satria Jati B

Sertifikasi Ketenagalistrikan Akan Dilakukan Secara Online

Penulis : Pandu Satria Jati B



Dirjen Ketenagalistrikan Jarman membuka Coffee Morning tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan Rabu (18/6).

Pemerintah terus menata metode sertifikasi teknis ketenagalistrikan sehingga pelayanan pemberian listrik kepada masyarakat dapat lebih cepat. Ke depan, semua sertifikasi di bidang ketenagalistrikan akan dilakukan secara online. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Ir Jarman MSc dalam acara coffee morning dengan tema Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang Ketenagalistrikan Rabu (18/6). Acara yang digelar secara rutin untuk menjembatani komunikasi antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan para pemangku kepentingan ini dihadiri oleh perwakilan dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan, Asosiasi/Perhimpunan Sub Sektor Ketenagalistrikan, Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan Lembaga Sertifikasi Produk.

Dalam sambutannya Jarman menyampaikan bahwa Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 556K/20/DJL.1/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penomoran dan Registrasi Sertifikat di Bidang

Ketenagalistrikan ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan ini membakukan pemberian nomor sertifikat ketenagalistrikan yang akan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang telah mendapatkan Akreditasi dari Menteri cq. Dirjen Ketenagalistrikan, yaitu Lembaga Inspeksi Teknik yang menerbitkan sertifikat laik operasi untuk instalasi tenaga listrik, Lembaga Sertifikasi

Kompetensi yang menerbitkan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang menerbitkan sertifikat badan usaha untuk usaha jasa penunjang tenaga listrik.

Jarman menekankan bahwa pemberian Sertifikasi Laik Operasi (SLO) hanya bisa diterbitkan bila pelaksanaan pemasangannya sudah dilakukan oleh bada usaha yang telah bersertifikat. "Pelaksanaanya juga harus dilakukan oleh tenaga kompetensi yang telah bersertifikat," ujarnya. Peraturan ini membakukan sertifikat yang sudah ada ke dalam database yang mudah diakses. Jarman berharap peraturan ini dapat mulai berlaku 1 Januari 2015. "Saat ini semua pihak diharapkan menyiapkan diri," ungkapnya. Dengan penerbitan nomor register terhadap pelaksanaan sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan.



Coffee Morning ini dihadiri oleh perwakilan dari Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan, Asosiasi/Perhimpunan Sub Sektor Ketenagalistrikan, Badan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, dan Lembaga Sertifikasi Produk.



Dalam coffee morning tersebut, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani menyampaikan paparan mengenai Upaya Peningkatan Daya Saing Bidang Jasa Ketenagalistrikan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi. Dalam menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 yang memberlakukan pasar tunggal ASEAN, akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan diharapkan dapat menjawab tantangan MEA tersebut.

di Bidang Ketenagalistrikan. Sebagai penutup, Ketua Umum Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) Heru Subagio memaparkan presentasi tentang Kesiapan Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dalam Penerapan Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan. Heru mengaku siap menerapkan sistem akreditasi dan sertifikasi yang diatur oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. (PSJ)



Selanjutnya Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono memaparkan secara detail mengenai kebijakan penomoran dan Registrasi Sertifikat



Fot-foto Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan yang diselenggarakan di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Rabu (18/6). Coffee Morning menghadirkan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani, Direktur teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Agoes Triboesono, dan Ketua Umum Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) Heru Subagio.

Ditjen Ketenagalistrikan Sosialisasikan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik



Dokumentasi Coffee Morning sosialisasi penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap untuk golongan tertentu. Coffee Morning ini menghadirkan Deputy Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo yang memaparkan Pengaruh Penyesuaian TTL Golongan Rumah Tangga Terhadap Inflasi.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM pada hari Jumat (27/6) menyelenggarakan kegiatan coffee morning dengan tema 'Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Kenaikan Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap untuk Golongan Tertentu'. Acara yang diselenggarakan di gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta Selatan ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi industri, serta konsumen listrik PT PLN (Persero).

Coffee Morning ini menghadirkan Deputy Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo untuk memaparkan mengenai Pengaruh Penyesuaian TTL Golongan

Rumah Tangga Terhadap Inflasi. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra memaparkan landasan hukum dan latar belakang Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap

Untuk Golongan Tertentu. Sedangkan Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun mempresentasikan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2014 per 1 Juli 2014 terkait dengan pengaruhnya terhadap Korporasi PT PLN.



Coffee Morning ini dihadiri oleh perwakilan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi industri, serta konsumen listrik PT PLN (Persero).



Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Satya Zulfanitra memaparkan landasan hukum dan latar belakang Penghapusan Subsidi Listrik Melalui Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Secara Bertahap Untuk Golongan Tertentu.

Dalam sambutannya Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman menyampaikan bahwa dalam rangka mempertahankan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik, peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen, peningkatan rasio elektrifikasi, dan mendorong subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, maka perlu dilakukan penghapusan subsidi listrik melalui penyesuaian Tarif Tenaga Listrik untuk golongan pelanggan tertentu. Sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan Tarif Tenaga Listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Satya Zulfanitra mengungkapkan bahwa sebagai tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 10 Juni 2014 tentang Asumsi Dasar

Subsidi Listrik RAPBN-P Tahun Anggaran 2014, Pemerintah akan melakukan penghapusan subsidi listrik melalui penyesuaian Tarif Tenaga Listrik secara bertahap untuk golongan pelanggan tertentu yaitu golongan pelanggan industri menengah (I-3) yang non go public, golongan pelanggan rumah tangga (R-1 1.300 VA, R-1 2.200 VA, dan R-2 3.500 VA s.d 5.500 VA), golongan pelanggan Pemerintah (P-2 diatas 200 kVA),

dan Penerangan Jalan Umum (P-3) setiap 2 (dua) bulan yang diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2014.

Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik tersebut, diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengubah gaya hidup agar lebih hemat listrik, sehingga dapat mengurangi beban subsidi listrik. (PSJ)



Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero) Benny Marbun mempresentasikan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik Tahun 2014 per 1 Juli 2014 terkait dengan pengaruhnya terhadap Korporasi PT PLN.

Dirjen Ketenagalistrikan Lantik Pejabat Eselon III dan IV



Pengucapan sumpah jabatan oleh pejabat Eselon II dan IV yang dilantik oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Jumat (27/6).

Jumat (27/6), Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Ir Jarman MSC melantik pejabat Eselon II dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Selain melantik pejabat struktural, Dirjen juga menyerahkan SK kenaikan pangkat dari Menteri ESDM kepada 17 pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Dalam pelantikan dan penyerahan SK yang digelar di Aula Samaun Samadikun tersebut, hadir para pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan

Ditjen Ketenagalistrikan, serta Pengurus Dharma Wanita Ditjen Ketenagalistrikan.

Dalam sambutannya, Dirjen menyampaikan bahwa Ditjen Ketenagalistrikan memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi kebijakan, fungsi regulator dan fungsi pengguna anggaran di sektor ketenagalistrikan. "Untuk memaksimalkan fungsi-fungsi ini, tahun ini kita menerima pegawai yang cukup dan akan dilanjutkan tahun depan,"

ujarnya. Menurut Jarman, Jabatan inspektur ketenagalistrikan harus dimaksimalkan sebab pembinaannya ada di kantor ini. Menurutnya Inspektur Ketenagalistrikan yang ada di kantor lain, akan mengacu pada Inspektur Ketenagalistrikan di kantor Ditjen ketenagalistrikan ini. Selain itu Jarman berharap peran serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat ditingkatkan sehingga mendukung ketiga fungsi Ditjen Ketenagalistrikan.

Dirjen berpesan agar apa yang sudah disampaikan dalam sumpah jabatan dapat dicermati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Ia berharap melalui pengangkatan dan penggeseran jabatan dapat lebih meningkatkan integritas dan kemampuan, sehingga bisa meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.



Panandatanganan berita acara pelantia yang disaksikan oleh Dirjen Ketenagalistrikan dan para Direktur Ditjen Ketenagalistrikan.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik Jumat (27/6) :



Dokumentasi pelantikan pejabat struktural eselon III dan IV serta penyerahan SK kenaikan pangkat dari Menteri ESDM kepada 17 pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Sumber foto : SLR

NO	Nama	Jabatan Baru
1	Husni Safruddin, ST MT	Kepala Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
2	Ir. Agus Bahagianto	Kepala Sub Direktorat Informasi Ketenagalistrikan dan Penyertaan Modal Pemerintah, Direktorat Pembinaan Program
3	Ir. Mira Suryastuti, M.Eng.Sc	Kepala Sub Direktorat Tenaga Teknik, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
4	Wiwid Muljadi, S.Kom	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
5	Drs Hinsa Silaen	Kepala Sub Bagian perbendaharaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
6	Irvendiaz, SE	Kepala Sub Bagian Kekayaan Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
7	Chusniarti Putri Budi Sedjati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Informasi Huku, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
8	Darman, SE	Kepala Seksi Pendanaan Listrik Perdesaan, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
9	Suryani, ST	Kepala Seksi Bimbingan Usaha, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
10	Firdaus Agusian, ST	Kepala Seksi Fasilitas Hubungan Komersial, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
11	Felix Rudianto, ST	Kepala Seksi Pengawasan Perlindungan Konsumen Listrik, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
12	Wahyu Joko Santoso, ST, MT	Kepala Seksi Perlindungan Lingkungan Pembangkit Tenaga Listrik, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

PENGURANGAN SUBSIDI LISTRIK GOLONGAN TERTENTU MELALUI PENYESUAIAN TARIF TENAGA LISTRIK

oleh : David F Silalahi

LATAR BELAKANG

Energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan modern manusia, tanpa listrik aktivitas menjadi lumpuh. Hampir seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh termasuk roda pemerintahan dan perekonomian secara khusus bisa terganggu bila tidak ada listrik, hampir seluruh aktivitas kehidupan modern sangat bergantung pada listrik. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat, bahkan Pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk memastikan ketersediaan energi listrik yang terjangkau bagi masyarakat. PT PLN (Persero) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam menyediakan listrik bagi masyarakat harus terus meningkatkan kapasitasnya agar mampu mengimbangi tingginya pertumbuhan permintaan listrik di Indonesia.

Kebutuhan listrik nasional rata-rata tumbuh sekitar 8 – 9 % per tahun. Angka ini berarti bahwa setiap tahun harus ada tambahan sekitar 5.700 MW kapasitas pembangkit baru. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah dalam penyediaan listrik karena dibutuhkan dana yang begitu besar dalam investasi infrastruktur ketenagalistrikan, mulai dari pembangunan pembangkit-pembangkit baru, jaringan transmisi, dan hingga jaringan distribusi agar listrik dapat disalurkan hingga ke konsumen. Tantangan berikutnya adalah bahwa kenyataan rasio elektrifikasi yang baru mencapai sekitar 80,5%, artinya masih ada sekitar 19,5% masyarakat belum memiliki akses terhadap listrik sehingga tidak dapat menikmati listrik. Tantangan

besar lainnya adalah kebutuhan subsidi listrik yang terus meningkat jumlahnya seiring dengan pertumbuhan kebutuhan listrik yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tinggi.

Perlu kita ketahui bahwa subsidi listrik yang harus ditanggung oleh Pemerintah dalam belanja APBN terus meningkat, dimana pada tahun 2013, jumlah subsidi listrik naik mencapai Rp 101,21 triliun. Padahal pada era tahun 2000-2004, subsidi listrik hanya berkisar Rp 3,3 triliun. Ini artinya subsidi listrik mengalami laju peningkatan yang luar biasa, lebih dari 30 kali lipat. Hal ini tidak mungkin terus dibiarkan karena sangat menggerus kemampuan keuangan Negara. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian subsidi listrik agar anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu, terus menerus tersedot oleh belanja subsidi listrik.

POTRET KETENAGALISTRIKAN INDONESIA

- Pada tahun 2012 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik adalah 45.253 MW. Kapasitas pembangkit tenaga listrik ini naik menjadi 47.128 MW pada tahun 2013.
- Penambahan transmisi tenaga listrik selama kurun waktu 2004 s.d. 2012 adalah sepanjang 7.302 kms, yaitu 4.155 kms pada tahun 2004-2009 (masa Pemerintahan KIB I), dan 3.147 kms selama kurun waktu tahun 2009-2012 (masa Pemerintahan

KIB II). Target penambahan panjang transmisi pada tahun 2013 melalui pendanaan APBN adalah 1.949 kms, namun hanya terealisasi sepanjang 360 kms. Hal ini akibat banyaknya kendala dalam pembebasan tanah.

- Penambahan jaringan distribusi tenaga listrik selama kurun waktu 2004 s.d. 2012 adalah sepanjang 134.201 kms, yaitu 31.762 kms pada tahun 2004-2009 (masa Pemerintahan KIB I), dan 102.449 kms selama kurun waktu tahun 2009-2012 (masa Pemerintahan KIB II); Target penambahan panjang jaringan distribusi dari tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 174.202 kms
- Target penambahan panjang jaringan distribusi pada tahun 2013 melalui pendanaan APBN adalah 9.256,74 kms, namun terealisasinya lebih besar yaitu 12.702,6 kms.
- Pada tahun 2012 realisasi investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai US\$ 7,41 miliar, sedangkan tahun 2013 ini investasi sektor Ketenagalistrikan dari target US\$ 6.42 miliar hanya tercapai US\$ 3,87 miliar atau sekitar 60,35%. Tidak tercapainya rencana investasi tahun 2013 disebabkan oleh terkendalanya proyek-proyek ketenagalistrikan akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis pembangkit, serta terlambatnya penerbitan DIPA SLA.
- Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi

dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2012 rasio elektrifikasi baru mencapai 76,56 % dan pada tahun 2013 rasio elektrifikasi meningkat sebesar 3,95 % dibandingkan dengan tahun 2012. Pencapaian pada akhir tahun 2013 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ada di dalam RPJM Nasional sebesar 76,80%. Pencapaian luar biasa ini tentunya akan terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada tahun 2014, rasio elektrifikasi mencapai 81,51%.

KEBIJAKAN PENGURANGAN SUBSIDI LISTRIK

Pada dasarnya subsidi listrik adalah selisih antara harga jual/tarif listrik dengan biaya produksinya. Saat ini masih terdapat selisih yang jauh antara biaya produksi dengan harga jualnya ke konsumen. Sebagai gambaran, berdasarkan data realisasi tahun 2013, rata-rata BPP tenaga listrik sebesar Rp.1.289/kWh, dengan margin 7% menjadi sebesar Rp. 1.379/kWh, sementara harga jual rata-rata (tarif) yang dibayar oleh pelanggan hanya sebesar Rp.819/kWh, sehingga ada selisih sebesar Rp. 560/kWh. Untuk menutup selisih ini, pada tahun 2013, Pemerintah harus membayar selisih tersebut dalam bentuk subsidi kepada PT PLN (Persero), besarnya mencapai Rp. 101,21 triliun, untuk menjaga agar PLN dapat terus beroperasi menyediakan pasokan listrik.

Kebijakan subsidi listrik diawali pada tahun 2000 dengan bentuk "corporate cash flow subsidy" atau defisit arus kas yaitu Pemerintah memberikan selisih antara biaya operasional PLN dalam penyediaan tenaga listrik dengan pendapatan tarif listrik yang diperoleh dari pelanggan PLN agar PLN tidak merugi. Kemudian pada tahun 2001 hingga tahun 2004 kebijakan subsidi

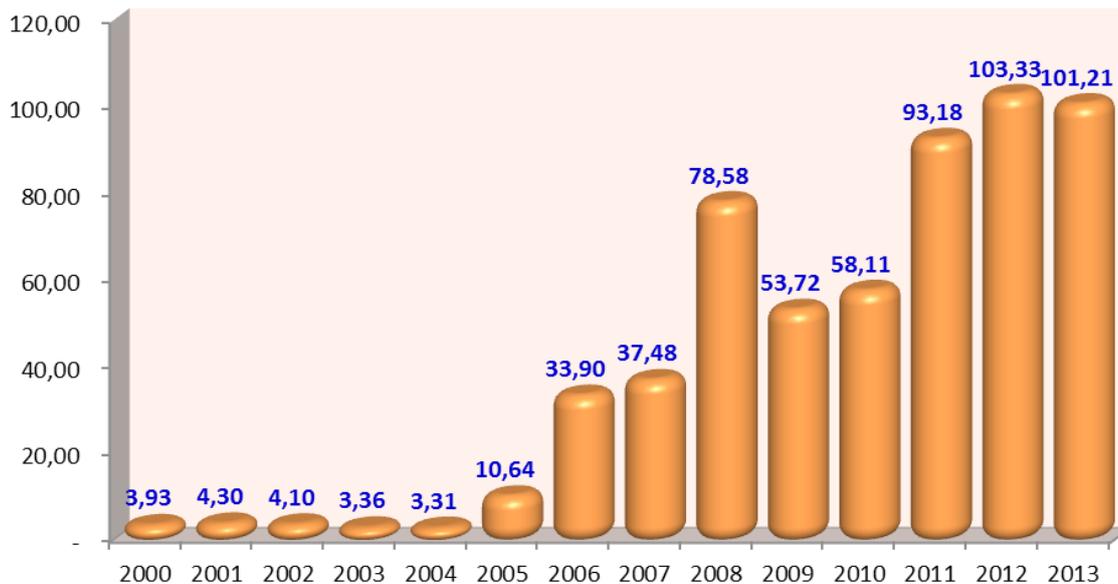
listrik diganti menjadi subsidi konsumen terarah, yaitu hanya pelanggan dengan daya sampai dengan 450 VA yang diberikan subsidi, itupun hanya penggunaan 60 kWh pertama. Dengan adanya gejolak memburuknya kondisi perekonomian nasional pada tahun 2005, dimana terjadi pelemahan nilai tukar Rupiah dan naiknya harga minyak dunia yang mempengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat. Tentunya hal ini menyebabkan biaya penyediaan listrik akan membengkak yang menyebabkan harga jual listrik semestinya harus dinaikkan untuk mengimbangi. Namun untuk menjaga agar masyarakat dapat membeli listrik dengan harga yang terjangkau maka Pemerintah mengubah kebijakan subsidi listrik menjadi subsidi konsumen diperluas. Dengan subsidi konsumen diperluas ini maka seluruh konsumen yang tarif listriknya masih dibawah biaya penyediaannya wajib diberikan subsidi listrik oleh Pemerintah. Kebijakan inilah yang terus berlangsung hingga saat ini dan menjadi beban keuangan Negara, dikarenakan jumlah subsidi yang terus membengkak (Gambar 1) Hal ini menyulitkan kemampuan keuangan Negara yang terbatas.

Pemerintah menyadari bahwa untuk menjaga keuangan Negara perlu dilakukan perubahan arah

kebijakan. Subsidi listrik memang perlu, namun tidak boleh terus menggerus keuangan Negara dikarenakan jumlahnya yang terus meningkat. Untuk itu perlu suatu upaya bagaimana beban subsidi listrik ini dapat dikendalikan bahkan dikurangi secara bertahap. Apalagi mengingat bahwa subsidi listrik sesuai amanat Undang-undang No.30 Tahun 2007 tentang Energi maupun Undang-Undang No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan hanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tahun 2013, dengan meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam pembahasan APBN Tahun 2013, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang bahwa dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen harus melalui persetujuan DPR-RI, maka Pemerintah melakukan penyesuaian tarif tenaga listrik dengan kenaikan rata-rata sebesar 15% melalui penyesuaian secara bertahap triwulanan 4x. Dalam penyesuaian tahun 2014 ini, Pemerintah menyatakan bahwa subsidi listrik untuk 4 (empat) golongan pelanggan yang sudah mampu juga turut dihapuskan. Adapun keempat golongan pelanggan tersebut adalah :





1. Pelanggan Rumah Tangga Besar (R-3, daya 6.600 VA ke atas), contoh : rumah mewah.
2. Pelanggan Bisnis Menengah (B-2, daya 6.600 VA s.d 200 kVA), contoh : hotel bintang 3, kantor perbankan, restoran besar.
3. Pelanggan Bisnis Besar (B-3, daya diatas 200 kVA), contoh : Shopping Center/Mall, Hotel bintang 4, hotel bintang 5, taman hiburan dan rekreasi komersil, stasiun TV swasta.
4. Pelanggan Kantor Pemerintah sedang (P-1, daya 6.600 VA s.d 200 kVA), contoh : Kantor Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2014, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik Pemerintah kembali mengusulkan penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan listrik golongan industri besar I-4 daya diatas 30.000 kVA dan industri menengah I-3 go public daya diatas 200 kVA. Semula telah disetujui penghapusan subsidi sekaligus terhadap kedua pelanggan tersebut, yang berarti bahwa tarif nya langsung dinaikkan ke tarif keekonomiannya, namun dengan memperhatikan hasil kajian LPEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memberi keringanan

bagi pelanggan tersebut, maka kembali dengan persetujuan DPR-RI, maka penyesuaian tariff listrik dilakukan secara bertahap 4 x 2 bulanan.

Adanya perubahan kurs yang melonjaktinggi, semula diasumsikan Rp. 10.500/USD dalam APBN 2014, namun dengan realisasi terkini kurs diproyeksikan menjadi Rp. 11.600/USD dalam APBN-P 2014, serta proyeksi tidak tercapainya target pendapatan Negara menyebabkan keuangan Negara tidak mampu menanggung beban subsidi listrik yang turut membengkak. Agar dapat menekan subsidi listrik, perlu ada perubahan kebijakan terhadap pemberian subsidi listrik. Maka dalam pembahasan APBN Perubahan Tahun 2014 dengan DPR-RI, Pemerintah kembali mengusulkan penghapusan subsidi listrik untuk 6 (enam) golongan pelanggan, yaitu :

1. Industri I-3 non go public (daya diatas 200 kVA), melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 11,57% setiap dua bulan,
2. Rumah Tangga R-1 (daya 1.300 VA), melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 11,36% setiap dua bulan,

3. Rumah Tangga R-1 (daya 2.200 VA), melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 10,43% setiap dua bulan,
4. Rumah Tangga R-2 (daya 3.500 VA s.d 5.500 VA), melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,70 % setiap dua bulan,
5. Pemerintah P-2 (daya diatas 200 kVA), melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 5,36 % setiap dua bulan,
6. Penerangan Jalan Umum P-3, melalui kenaikan tarif listrik secara bertahap rata-rata 10,69% setiap dua bulan,

yang diberlakukan mulai 1 Juli 2014 sampai dengan Desember 2014.

Adapun dasar penghapusan subsidi listrik ini juga mengingat bahwa golongan pelanggan Rumah Tangga dengan daya diatas 1.300 VA sudah termasuk dalam kelompok kelas menengah ke atas yang tidak tepat diberikan subsidi. Sedangkan penyesuaian tarif pelanggan Industri I-3 non go public ditujukan untuk menghilangkan perbedaan penerapan tarif listrik antara Industri I-3 go public dan I-3 non go public yang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dinilai

berpotensi menimbulkan iklim persaingan usaha yang tidak sehat sesama industri menengah I-3.

DAMPAK POSITIF PENGURANGAN SUBSIDI LISTRIK

Kebijakan Pemerintah mengurangi subsidi listrik dengan penyesuaian TTL masih disambut negatif oleh berbagai kalangan. Namun demikian tidak selalu harus dipandang negatif, penyesuaian TTL juga memberi dampak positif, antara lain:

- Selama ini masyarakat pelanggan listrik dimanjakan dengan tarif listrik yang disubsidi, mengakibatkan penggunaan listrik yang cenderung boros, dan sulit sekali diajak untuk hemat listrik. Dengan disesuaikan tarif listrik pelanggan tersebut

menjadi tarif listrik non subsidi, tentu akan memaksa pengguna dengan sendirinya untuk lebih berhemat menggunakan listrik, jika dia tidak mau membayar tagihan yang besar.

- Dengan adanya penghematan disisi konsumen, tentu turut mengurangi tenaga listrik yang harus disediakan/dibangkitkan, terutama yang dibangkitkan dengan membakar BBM di pembangkit listrik, dan ini akan mengurangi biaya produksi listrik, dan pada akhirnya juga mengurangi subsidi listrik;
- Dengan adanya penghapusan subsidi listrik bagi pelanggan industri menengah I-3 daya di atas 200 kVA dan industri besar I-4 daya 30.000 kVA ke atas akan merangsang pelanggan industri tersebut untuk mengusahakan kebutuhan listriknya sendiri

dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan membeli dari PLN.

- Subsidi listrik yang dihemat dapat dialihkan oleh Pemerintah untuk membangun infrastruktur listrik di Indonesia dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi yang saat ini baru mencapai 80,51%, sehingga semakin banyak lagi daerah-daerah yang bisa menikmati listrik.

TINJAUAN PROGRAM LISTRIK PERDESAAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

Oleh : Hari Dwi Wijayanto (Perencana)

KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

Kebijakan umum pengembangan ketenagalistrikan dalam jangka pendek dimana kapasitas pembangkit PLN masih terbatas karena proyek-proyek pembangkit belum sepenuhnya selesai, PLN telah dan akan memenuhi permintaan tenaga listrik dengan menyewa pembangkit sebagai solusi interim. Pada tahun-tahun berikutnya dimana penambahan kapasitas pembangkit dan transmisi diharapkan telah selesai dan reserve margin telah mencukupi, maka penjualan akan dipacu untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik. Hal ini dilakukan untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi secara signifikan dengan menyambung konsumen residensial baru dalam jumlah yang cukup tinggi setiap tahun, dan melayani semua daftar tunggu yang ada.

Masalah penyediaan tenaga listrik yang mendesak adalah upaya memenuhi listrik pada daerah-daerah yang kekurangan pasokan listrik dan mengganti pembangkit berbahan bakar minyak dengan bahan bakar non-minyak serta melistriki daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik. Tindakan yang telah dilakukan di wilayah operasi Indonesia Barat dan Timur meliputi sewa pembangkit, pembelian energi listrik dari IPP skala kecil, bermitra/kerjasama operasi pembangkit dengan Pemda setempat, pembelian excess power, percepatan pembangunan

PLTU batubara PerPres 71/2006, membangun saluran transmisi, mengamankan kontinuitas pasokan energi primer dan memasang beberapa PLTS secara terbatas.

Sedangkan tindakan jangka pendek di Jawa – Bali berupa percepatan pengadaan trafo daya 150/20 kV dan trafo interbus 500/150 kV, menambah kapasitas pembangkit di Bali, mempercepat pembangunan kabel laut Jawa-Bali 150 kV sirkuit 3 dan 4, dan memasang kapasitor shunt di sistem Jakarta untuk perbaikan tegangan.

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi secara umum diarahkan pada perbaikan tegangan pelayanan, penurunan susut teknis jaringan dan rehabilitasi jaringan yang tua. Kegiatan berikutnya adalah investasi perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

Pengembangan kapasitas pembangkit direncanakan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan margin cadangan (reserve margin) tertentu dan sedapat mungkin direncanakan secara optimal dengan prinsip biaya terendah (least cost). Pengembangan pembangkit juga mengutamakan pemanfaatan sumber energi setempat, terutama energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air.

Beberapa proyek pembangkit telah dinyatakan akan dikerjakan sebagai proyek PLN atau proyek listrik swasta (IPP), sedangkan beberapa proyek lagi masih belum ditetapkan

sebagai proyek PLN atau IPP. Hal ini dimaksudkan agar PLN nanti, atas persetujuan Pemerintah, akan memutuskan apakah suatu proyek diimplementasikan sebagai proyek PLN atau IPP.

Pengembangan sistem transmisi direncanakan untuk memperoleh keseimbangan antara kapasitas pembangkitan dan kebutuhan daya listrik secara efisien dengan memenuhi kriteria keandalan dan kualitas tertentu. Pada sistem kelistrikan yang sudah besar seperti Sumatera dan Jawa, direncanakan pula satu sistem transmisi yang menjadi tulang punggung sistem kelistrikan (backbone) berupa saluran transmisi tegangan ekstra tinggi.

Pembangunan listrik perdesaan merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Kebijakan yang diambil oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) dan PLN dalam pembangunan listrik desa untuk menunjang rasio elektrifikasi 81, 51% di tahun 2014 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kementerian ESDM 2010-2014 adalah:

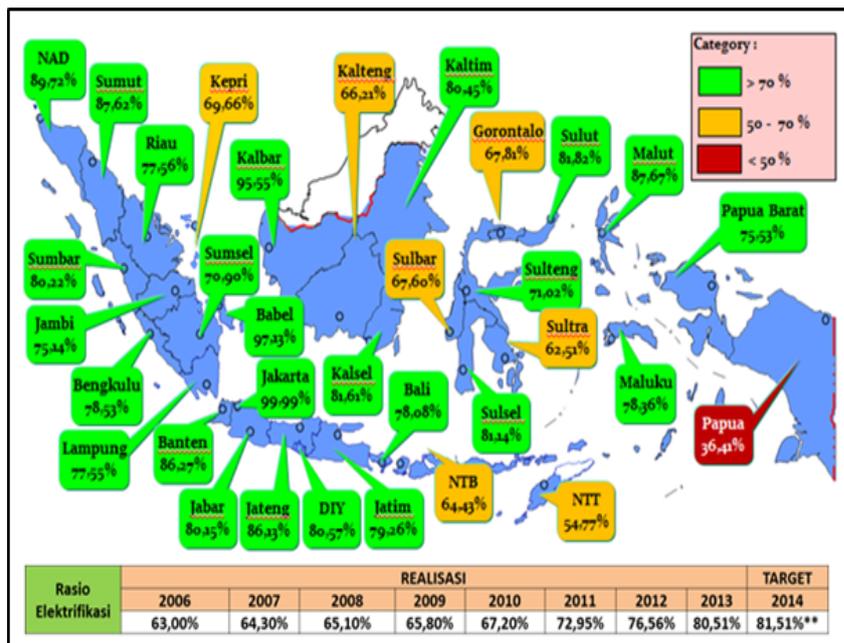
- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek GI Baru atau Extension Trafo GI yang pendanaannya diperoleh dari APBN.
- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk

mendukung evakuasi daya dari proyek PLTU skala kecil tersebar dan pembangkit mikro / mini tenaga air yang pendanaannya diperoleh dari APBN.

- Pembangunan jalur keluar jaringan distribusi untuk mendukung evakuasi daya dari proyek PLTU skala kecil tersebar yang pendanaannya dari APLN, dengan catatan jalur keluar jaringan distribusi tersebut belum disediakan dari APLN.
- Melistriki desa baru maupun desa lama yang sebagian dari dusun tersebut belum berlistrik, daerah terpencil dan daerah perbatasan.
- Dimungkinkan pemasangan load break switch untuk menunjang perbaikan keandalan jaringan tegangan menengah dan tiang 14 meter serta konduktor 240 mm² untuk mengantisipasi kebutuhan pengembangan sistem.
- Dimungkinkan pengadaan hybrid PLTS dan hybrid PLTB yang sistemnya terhubung dengan grid PLN.
- Melaksanakan program Listrik Murah dan Hemat dengan target masyarakat nelayan, daerah tertinggal dan akselerasi rasio elektrifikasi.

KONDISI KELISTRIKAN SAAT INI

Penjualan tenaga listrik pada lima tahun terakhir tumbuh rata-rata 8,5% per Tahun, sedangkan pertumbuhan rata-rata penjualan listrik di Jawa Bali (6,3% per tahun) relatif lebih rendah daripada pertumbuhan rata-rata di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Konsumsi tenaga listrik pada tahun 2013 mencapai sekitar 188 TWh, dimana masih didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 41%, sektor industri sebesar 34%, sektor komersial sebesar 19%, dan sektor publik sebesar 6%.



Gambar 1. Peta Rasio Elektrifikasi Tahun 2013

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Perkembangan rasio elektrifikasi secara nasional dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, yaitu dari 76,56% pada tahun 2012 menjadi 80,51% pada tahun 2013. Untuk rasio elektrifikasi provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 sebesar 53,63%, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 64,43%. Pada periode tersebut kenaikan rasio elektrifikasi pada wilayah-wilayah Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya diperlihatkan pada gambar 1.

Sistem kelistrikan di Provinsi NTB pada tahun 2013 terdiri atas satu sistem besar 150 kV dan dua sistem menengah 20 kV serta ada beberapa sistem kecil terisolasi. Untuk sistem besar dipasang dari PLTU, PLTD dan PLTM/PLTMH. Sedangkan sistem menengah dan sistem kecil sebagian besar dipasang dari PLTD dan sebagian kecil PLMH. Sistem tersebut adalah:

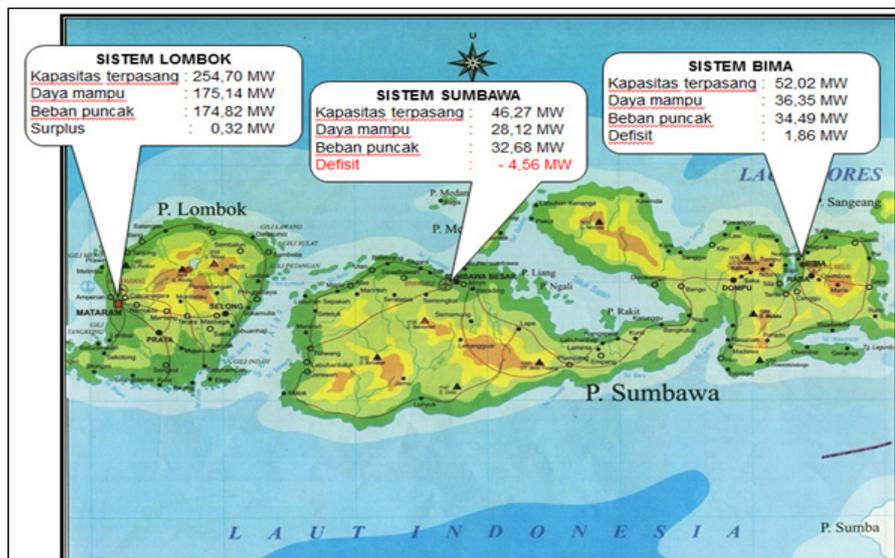
- Sistem Lombok meliputi Kota Mataram, Kabupaten Lombok

Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

- Sistem Sumbawa meliputi Kota Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat.
- Sistem Bima meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Sedangkan untuk sistem terisolasi terdiri dari atas Pulau-Pulau kecil yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Pulau-pulau kecil ini mempunyai pembangkit sendiri dan terhubung ke beban melalui jaringan 20 kV atau 220 Volt. Peta sistem kelistrikan di Provinsi NTB untuk ketiga sistem tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.

Pada tahun 2012 dibangun jaringan kabel laut 20 kV yang menginterkoneksi Sistem Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air) ke Sistem Lombok dan telah beroperasi pada 19 September 2012. Dengan adanya kabel laut ini maka PLTD Tiga Gili berada pada kondisi stand by dan daya di Tiga Gili dipasang dari Sistem Lombok serta dapat mengoptimalkan operasi PLTS di Tiga Gili.



Gambar 2. Kondisi Sistem Kelistrikan NTB Januari 2014

Dari gambar diatas, terlihat ada dua sistem yang surplus yaitu sistem Lombok dan sistem Bima. Sedangkan sistem Sumbawa mengalami defisit. Beban puncak pada sistem Sumbawa mencapai 32,68 MW dengan daya mampu 28,12 MW sehingga berakibat sistem mengalami defisit 4,56 MW. Hal ini tentu menjadi perhatian serius pemerintah untuk mengatasinya, salah satunya melalui program Listrik Perdesaan. Sebesar 86% dari produksi tenaga listrik di Provinsi NTB adalah dari PLTD sehingga mengakibatkan biaya pokok produksi menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 3.182/kWh pada Triwulan III tahun 2013. Daftar tunggu dan calon pelanggan potensial di Provinsi NTB pada Triwulan III tahun 2013 mencapai 96 ribu pelanggan dengan daya 104 MVA telah dapat dilayani dengan menyewa pembangkit.

PENGEMBANGAN LISTRIK PERDESAAN

Untuk saat ini pembangunan listrik desa di seluruh Indonesia dilaksanakan oleh 31 Satuan Kerja Listrik Desa / Satker Lisdes, dimana untuk 30 Satker Lisdes tersebut berada pada masing-masing provinsi, kecuali untuk 1 Satker Lisdes merupakan gabungan dua

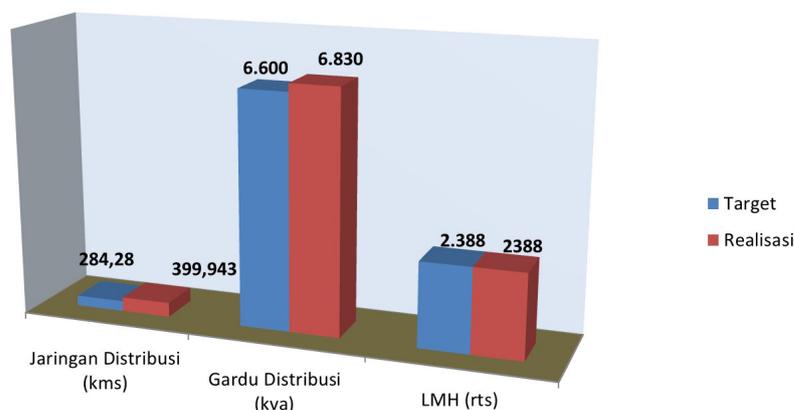
provinsi yaitu Jateng dan DIY. Tujuan pembangunan listrik desa bertujuan untuk:

- Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan.
- Meningkatkan kualitas bidang pendidikan dan kesehatan.
- Mendorong produktivitas ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan.
- Memudahkan dan mempercepat masyarakat pedesaan memperoleh informasi dari media elektronik serta media komunikasi lainnya.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang selanjutnya diharapkan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada tahun 2013, Satuan Kerja Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Barat ditargetkan membangun jaringan distribusi sepanjang 284,28 kms. Untuk pembangunan gardu distribusi sebesar 6,6 MVA, sedangkan listrik murah hemat ditargetkan sebanyak 2.388 RTS (Rumah Tangga Sasaran).

Realisasi pekerjaan Listrik Perdesaan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 yaitu pekerjaan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 146,151 kms dan jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 253,792 kms, sehingga total jaringan distribusi yang diselesaikan sepanjang 399,943 kms (140%). Untuk pekerjaan gardu distribusi berhasil diselesaikan sebanyak 83 buah atau 6.830 kVA (103%). Sedangkan pekerjaan listrik murah hemat berhasil diselesaikan seluruhnya sehingga persentase mencapai 100%.

Dari grafik dapat terlihat bahwa progress untuk pekerjaan jaringan distribusi dan juga gardu distribusi berjalan dengan baik bahkan mampu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Demikian pula untuk pekerjaan listrik murah hemat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target yang ditetapkan.



Grafik 1. Progress Lisdes NTB TA 2013



Gambar 3. Foto Pembangunan Jaringan dan Gardu Distribusi

Berikut dibawah ini detail data lokasi desa untuk pembangunan jaringan dan gardu distribusi pada tahun 2013. Total desa yang mendapat program jaringan dan gardu distribusi sebanyak 52 desa yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten.

RENCANA TAHUN 2014

Untuk tahun 2014, provinsi Nusa tenggara barat ditargetkan membangun jaringan tegangan rendah (JTR) sebesar 67,81 kms dan untuk pekerjaan jaringan tegangan menengah (JTM) sebesar

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH DESA	JTM (KMS)	JTR (KMS)	GD (bh/kVA)
1.	LOMBOK BARAT	8	31,448	27,69	17
2.	LOMBOK UTARA	6	17,67	16,94	8
3.	LOMBOK TENGAH	7	11,57	17,73	7
4.	LOMBOK TIMUR	10	43,88	34,53	20
5.	SUMBAWA	2	14,27	2,23	1
6.	SUMBAWA BARAT	3	50,10	12,80	6
7.	DOMPU	6	16,75	16,23	7
8.	BIMA	10	68,07	17,97	17
TOTAL		52	253,792	146,151	83/6.380

Tabel 1. Realisasi jaringan dan gardu distribusi Tahun 2013

NO.	KAB/KOTA	JUMLAH RTS
1.	KOTA MATARAM	64
2.	LOMBOK BARAT	368
3.	LOMBOK UTARA	140
4.	LOMBOK TIMUR	657
5.	LOMBOK TENGAH	484
6.	SUMBAWA BARAT	50
7.	SUMBAWA	205
8.	DOMPU	153
9.	BIMA	242
10.	KOTA BIMA	25
Total		2.388

Tabel 2. Realisasi Listrik Murah Hemat Tahun 2013

96,25 kms dengan total 164,06 kms. Untuk gardu distribusi ditargetkan sebesar 4.520 kVA. Sedangkan untuk pekerjaan listrik murah hemat yang berganti menjadi listrik gratis, ditargetkan mampu mencapai 3.500 RTS.

KESIMPULAN

Program listrik perdesaan di provinsi Nusa tenggara barat sudah berjalan dengan baik di tahun 2013. Hal ini terlihat dari capaian yang sesuai dengan target, bahkan untuk pekerjaan jaringan dan gardu distribusi mampu melebihi dari target yang ditetapkan. Namun untuk kedepannya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain yaitu :

1. Masih rendahnya rasio elektrifikasi provinsi NTB yaitu 64,43%
2. Kemampuan pabrikan untuk menyediakan material distribusi utama (MDU), yang berpotensi menyebabkan persediaan menjadi terbatas.
3. Lokasi listrik murah hemat yang harus disiapkan sebelumnya untuk mampu mencapai target di tahun 2014.

TARIF TENAGA LISTRIK : PENERAPANNYA BERTENTANGANKAH DENGAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT?

Penulis : David F Silalahi, ST



Sejak berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) beralih dari status pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan menjadi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. PT PLN (Persero) bukan lagi satu-satunya penyedia tenaga listrik terintegrasi dari pembangkitan sampai dengan penyaluran listrik hingga dapat dinikmati oleh konsumen listrik. Sudah ada beberapa pemegang izin lainnya, seperti PT Cikarang Listrindo, PT Bekasi Power, PT PLN Batam, PT PLN Tarakan sehingga tidak lagi dapat disebut memonopoli. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, maka terhadap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, tarif terhadap konsumennya ditetapkan oleh pemberi izin sesuai kewenangannya. PT PLN (Persero) mendapatkan izin usaha dari

Menteri ESDM, sehingga tarif listrik untuk konsumennya ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM. Saat ini tarif listrik PT PLN (Persero) yang diterapkan pada konsumen berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012. Terdapat sebanyak 37 jenis golongan tarif yang besarnya per kWh berbeda-beda menurut daya tersambung maupun peruntukannya. Secara umum terbagi dalam 8 kelompok, yaitu: Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah, Traksi, Curah, dan Layanan Khusus.

Beberapa bulan terakhir ini media cetak maupun media elektronik banyak memuat berita yang terkait dengan protes rencana kebijakan penyesuaian tarif bagi industri. Terkesan ada opini pelaku usaha bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Apa sebetulnya yang diprotes oleh mereka? Setelah Komisi VII DPR RI dalam Rapat

Kerja bersama dengan Pemerintah menyepakati untuk melakukan penghapusan subsidi listrik bagi pelanggan industri menengah go public dan industri besar akan diberlakukan mulai 1 Mei 2014. Sebagai tindak lanjut kesepakatan ini, Pemerintah berencana menyesuaikan tarif tenaga listrik tahun 2014, dengan tarif yang berbeda antara industri menengah go public dan non go public. Pengusaha pun menyuarakan keberatannya kepada Pemerintah, mulai dari keberatan terhadap penghapusan subsidi listrik tersebut, dan keberatan terhadap diskriminasi pelanggan industri menengah go public dan non go public, jika memang dilakukan penyesuaian tarif, semua industri menengah harus disesuaikan tanpa membedakan status go public atau tidak. Pengusaha menyuarakan bahwa Pemerintah telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6). Frase 'barang dan atau jasa yang sama' ini dapat dikaitkan dengan listrik. Bahwa untuk 'barang dan atau jasa' yang sama, yaitu listrik yang digunakan konsumen, ternyata realitasnya bahwa konsumen membayar harga/tarif yang berbeda-beda per kWh nya. Sebagai contoh anda sebagai konsumen PLN, membayar berbeda dengan tetangga anda yang juga konsumen PLN, hanya karena daya terpasang yang berbeda. Misalnya daya terpasang anda sebesar 2.200 VA karena anda lebih banyak menggunakan peralatan listrik, anda membayar tarif sebesar Rp. 1.004/kWh (tarif

prabayar). Sedangkan tetangga anda daya terpasang 450 VA karena rumah yang kecil dan hanya sedikit peralatan listrik, hanya membayar Rp. 415 (tarif prabayar). Padahal listrik yang anda gunakan adalah barang atau jasa yang sama, disuplai dari sumber listrik yang sama, penyedia yang sama, tegangan rendah yang sama, dan layanan kualitas yang sama. Apakah Pemerintah telah melakukan kebijakan tarif listrik yang bertentangan dengan larangan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999? Meskipun ada pelarangan tersebut, perlu diketahui bahwa Undang-Undang tersebut memberikan pengecualian untuk beberapa hal tertentu, antara lain : perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 50 huruf a). Mengingat bahwa kebijakan tarif listrik didasari oleh amanah Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan tersebut. Keberatan pengusaha terhadap rencana

penyesuaian tarif yang diterapkan berbeda antara perusahaan go public dan non go public yang dianggap sebagai diskriminasi tarif listrik, bukan hal yang relevan, dan dikecualikan dari aplikasi hukum persaingan. Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penerapan TTL tidak melanggar hukum persaingan usaha yang sehat(DFS).

REFERENSI :

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. PP No.14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
3. Permen 30 Tahun 2012 tentang TTL PT PLN (Persero)





**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan
Telpon 021-5225180, Fax. 021-5225381
www.djlpe.esdm.go.id e-mail: buletin@djlpe.esdm.go.id